

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO**

## **SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**OLEH :**

**AYUNI**

**E121 11 002**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## SKRIPSI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO

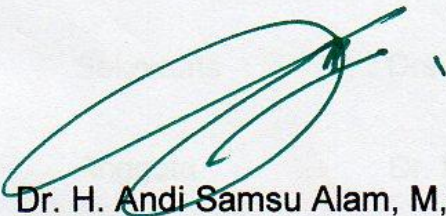
Yang diajukan oleh

**AYUNI**

**E121 11 002**

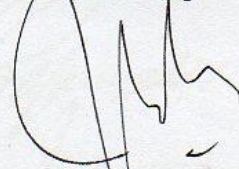
Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027


Pembimbing II



A. Murfhi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19720328 200012 1 001

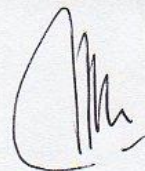
Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si  
NIP. 19630921 198702 2 001



**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA  
PALOPO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**AYUNI**

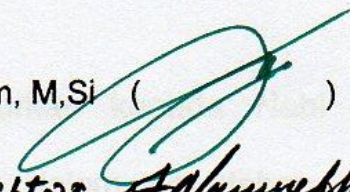
**E12111002**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

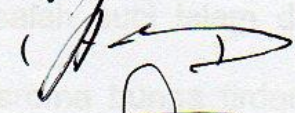
**Makassar, Pada Hari Rabu 3 juni 2015,**


menyetujui :

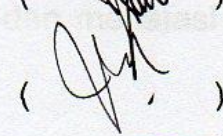
**PANITIA UJIAN :**

Ketua : Dr. H. Andi Samsu Alam, M,Si (  )

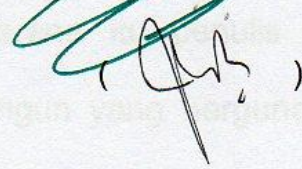
Sekretaris : Drs. Abdul Salam, Muektor  )

Anggota : Dr. H. A. Gau Kadir, MA (  )

Anggota : A. Lukman Irwan, S,ip , M,Si (  )

Anggota : A. Murfhi, S.Sos, M,Si (  )

Pembimbing I : Dr. H. Andi Samsu Alam. M,Si (  )

Pembimbing II : A. Murfhi S.Sos, M.Si (  )

## KATA PENGANTAR

### ***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo”** merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman dikarenakan perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang berguna untuk penyempurnaan selanjutnya. Penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan

Politik Pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya
3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku ketua jurusan ilmu politik dan pemerintahan dan Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan dan segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FISIP UNHAS khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku pembimbing 1 dan bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Ayahanda tercinta, Syamsu Alam yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Dan untuk ibunda tercinta Surnaeni yang telah melahirkan dan membesarkan penulis sampai saat ini. Penulis bukanlah apa-apa tanpa kalian.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada beliau.

6. Saudara-saudara penulis, Adik Rahmat dan Adik Puja atas kasih sayang selama ini, Penulis sangat mencintai kalian.
7. Terima kasih yang tak terhingga untuk tante Bumel yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moril maupun materiil.
8. Terima Kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah Kota Palopo, DPPKAD dan para informan yang turut serta membantu demi kelancaran skripsi ini.
9. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat tercinta IKA SMANET PALOPO 2011 dan “Sahabat-Sahabat Tercinta, Reva, Ompeng, Uchy, Fika, Armika, Odah, Ekibrahim, Didit, Ade damayanti iput Dan “Nearby” Nini, Fira, Uli, Danty, Dian, Eki, Yusda, Diah, Inal, Indha. Terima Kasih atas kegilaan-kegilaan yang telah kalian berikan hingga saat ini.
10. Terima kasih teman kelas semasa SMA XII IS B Reva, Angel, Metry, Ade damayanti, Erfan, dan Devy Sepsilya
11. Terima kasih Untuk “ The Angels” Gadis, Momoy, Nila ,Dewy, Endi terima kasih atas dukungan, perhatian, pengertian, motivasi serta candaan kalian selama ini dalam membantu penulis baik berupa materil maupun moril sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. tetap semangat dan bahagia selalu serta terima



kasih telah mau menjadi sahabat dalam suka dan duka. Kalian selalu dihati.

12. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan Enlightenment, Iping, Adit, Andis, Padul, Unci, Hendry, Adi, Fauzi, Awwing, Gusti, Hugo, Rijal, Ullah, Same, Hilal, Dodo, Irul, Heri, Gilang, Momoy, Amril, Arman, Ade, Ono, Dewy, Gadis, Nila, Unya, Wana, Wulan, Soleha, Anti, Ati, Tenri, Eka, Atum, Novben, Uni, Endi. Terima kasih atas tangis, canda tawa, dan cerita yang telah kalian berikan. Kalian tahu, kalian telah menjadi salah satu catatan sejarah hidup bagi Penulis. Penulis beruntung telah dipertemukan dengan Kalian. Otonomi 2011, TETES DARAH MILITAN !!!

13. Keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN Respublika 2006, Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightenment 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014. Salam Merdeka Militan!

14. Terima kasih untuk Pak Mursalim dan Kak Ina serta seluruh warga desa cenrana Kabupaten Bone, serta teman-teman KKNers Gel.87 Terkhusus untuk kak akil, kak rizal, kak tecang, kak sukma, yiska, ain dan rini. Terima Kasih telah menjadi keluarga dan saudara yang baik walaupun dalam waktu yang singkat.

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis

telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Sekian dan Terima Kasih.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Makassar, mei 2015

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
INTISARI .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1. Pengertian Implementasi .....	6

2.2.	Tinjauan Umum Tentang Kebijakan .....	8
2.2.1.	Pengertian Kebijakan.....	8
2.3	Model atau Proses Impelementasi Kebijakan .....	12
2.4	Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan .....	16
2.5	Faktor Penghambat Impelementasi Kebijakan.....	18
2.6	Tahap-Tahap Kebijakan.....	19
2.7	Jenis-jenis kebijakan.....	24
2.8	Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi masalah .....	26
2.9	Tinjauan umum tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah .....	27
2.9.1.	pengertian retribusi .....	27
2.9.2.	struktur dan besaran tarif retribusi	
	Pelayanan persampahan / kebersihan .....	28
2.9.3.	jenis-jenis retribusi daerah .....	32
2.9.4.	pengertian pendapatan asli daerah .....	34
2.10	Kerangka Konseptual.....	36

BAB III METODE PENELITIAN .....	39
3.1. Jenis dan Pendekatan Peneliitian.....	39
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
3.3. Sumber Data .....	39
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.4. Informan Penelitian .....	41
3.5. Analisis Data .....	41
3.6. Definisi Operasional .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
4.1.1. Letak dan Kondisi Geografis .....	46
4.1.2. Kependudukan .....	51
4.1.3. Kondisi Sosial Budaya .....	53
4.1.1.7. Profil Pemerintahan Kota Palopo .....	61
4.2. Gambaran Umum DPPKAD Kota Palopo	
4.2.1. sejarah DPPKAD .....	63
4.2.2. Tugas Pokok DPPKAD .....	64
4.2.3. Fungsi DPPKAD .....	64

4.2.4. Visi DPPKAD .....	64
4.2.5. Misi DPPKAD .....	65
4.3. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Palopo .....	65
4.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit .....	67
4.4.1. Kepala Dinas .....	67
4.4.2. Sekretaris .....	68
4.4.3. Bidang Pendapatan Asli Daerah .....	70
4.4.4. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.....	71
4.4.5. Bidang Anggaran dan Kas Daerah .....	72
4.4.6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	73
4.4.7. Bidang Aset Daerah.....	74
4.5. Hasil Penelitian .....	75
4.5.1. Potensi dan Target Penerimaan .....	75
4.5.2. Sistem Penarikan .....	84
4.5.3. Perbaikan Pelayanan kebersihan .....	85
4.6 Model Implementasi Kebijakan Retribusi .....	86
4.6.1. Interpretasi Kebijakan .....	86
4.6.2 Pengorganisasian .....	



4.6.3. Pelaksanaan kebijakan .....	93
4.7 Aspek mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi .....	96
4.8.Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan	105
BAB V PENUTUP .....	115
5.1. Kesimpulan .....	115
5.2. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

BAB IV		Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah Kota Palopo Berdasarkan Kecamatan	49
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kota Palopo	52
Table 3	penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan tertinggi Yang Di Tamatkan Di Kota Palopo	55
Tabel 4	perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi kota Palopo tahun 2011-2013	59

## DAFTAR GAMBAR

BAB II	halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	38
BAB IV	
Gambar 1 Peta Wilayah Kota Palopo .....	48

## INTISARI

**AYUNI, nomor pokok E121 11 002, Program Studi Ilmu Pemerintahanj urusan Politik Pemerintahan, Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. *Implementasi kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. (Dibimbing oleh DR.H.Andi Samsu Alam, M,Si da nA. Murfhi, S.Sos, M,Si)***

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota palopo ; (2) mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan retribusi kebersihan dalam pendorong peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)

Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan dan berlokasi di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi dan Wawancara langsung. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) sistem penarikan pemungutan retribusi kebersihan berpedoman kepada mekanisme retribusi daerah dengan jalur SKRD dan SSRD (2) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur.



## ABSTRACT

**AYUNI, serial number E 121 11 002, government study program politic government department, social and politic faculty Hasanuddin University. *Cleannes Retribution Policy Implementation Againts Local Budget Improvement InPalopo City.* ( Guided by Dr.H. AndiSamsuAlam, M,Si and A. Murfhi, S, Sos, M.Si )**

The purpose of this research is to : (1) to know and analyze cleanness retribution policy implementation againts local budget improvement in palopo city : (2) to know analyze aspects supporting and obstructing cleanness retribution policy implementation in local budget improvement.

Approximately, this research will be running for two months and locating in palopo city. Data collection technics used are observation an interviewing research type used is descriptive using literature study data collection technich with reading books, magazines, newspaper, documents, rules, and information media communicating to the problem, and observation is observing object study and interviewing with interview method.

Research result shows that : (1) cleannes retribution system alming to local retribution mechanism with SKRD and SSRS (2) the lack of people to pay cleanness retribution regulatory.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>1</sup> Id.m.wikipedia.org.pukul.20:50, 15 januari 2015

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah, kondisi tetap membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah dan kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat, salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber penerimaan dan kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri. Kemampuan pembiayaan daerah sangat ditentukan dari besar kecilnya penerimaan dan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dalam mengoptimalkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Disamping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.<sup>2</sup>

Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di kota palopo yaitu retribusi kebersihan. Mengingat perkembangan kota yang demikian pesat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang berdampak

---

<sup>2</sup> Keban,yeremias T.1995.indikator kinerja pemda, pendekatan manajemen dan kebijakan, Yogyakarta

pada peningkatan jumlah sampah, sehingga , mengakibatkan permintaan terhadap jasa kebersihan diperkirakan terus meningkat.

Kota Palopo dalam hal kebersihan secara jelas diatur dalam Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan tersebut membahas mengenai kewajiban warga masyarakat atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Dalam peraturan daerah kota palopo Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerinta Daerah, meliputi :

Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Retribusi kebersihan merupakan potensi yang cukup besar dan cukup menjanjikan untuk meningkatkan PAD khususnya di Kota Palopo. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah PAD dari



retribusi kebersihan di Kota Palopo pada tahun 2013 dan 2014. Dari beberapa fakta yang peneliti lihat melalui data dan pengamatan-pengamatan sementara, yang ingin peneliti kaji saat ini, bagaimana peran pemerintah di Kota Palopo untuk meningkatkan PAD melalui retribusi kebersihan dan faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah Skripsi yang berjudul : *“Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Palopo”*.

## **1.2. rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang , maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana model implementasi kebijakan retribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo pada tahun 2011- 2014?
- b. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat implemetasi kebijakan peningkatan retribusi kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota palopo.?

## **1.3. Tujuan penulisan**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjaditujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota palopo.
- b. Mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan retribusi kebersihan dalam pendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **1.4. Manfaat penulisan**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat praktis diharapkan memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah Daerah khususnya yang berkenaan dengan implementasi kebijakan retribusi kebersihan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Manfaat teoritis , dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang ilmu administrasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Implementasi

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan tersebut terjadi sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi melainkan yang dibutuhkan adalah manusia yang mempunyai ahli untuk mengoperasikan jaringan komputerisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menunjang terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung dengan adanya implementasi yang berorientasi pada pelayanan dan tujuan yang akan di tercapai.

Secara etimologis pengertian implementasi “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”<sup>3</sup>

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan

---

<sup>3</sup> Dunn, William. 2014 hal : 64. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta

sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain di atas dijelaskan juga bahwa implementasi adalah :“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”<sup>4</sup>. bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Ripley dan franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas

---

<sup>4</sup> Dunn, William.2014 hal : 65 . Pengantar Analisis kebijakan publik.Yogyakarta

program, kebijakan, keuntungan ( benefit ), atau suatu jenis keluaran yang nyata ( tangible output).<sup>5</sup>

Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah.<sup>6</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula

---

<sup>5</sup> Winarno budi, hal : 148 , kebijakan public .yogyakarta

<sup>6</sup> Winarno budi, hal :149, kebijakan public.yogyakarta

pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.<sup>7</sup>

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni; pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy analysis*), dan kedua kebijakan publik politik (*political public policy*). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.<sup>8</sup>

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni: pertama dikenal dengan istilah analisis kebijakan (*policy analysis*), dan kedua kebijakan publik politik (*political public policy*) (Hughes, 1994:145). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model-

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 2

<sup>8</sup> Op.cit, hal 5

model statistic dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistic, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.<sup>9</sup>

Kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Adanya pernyataan kehendak. Ini berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti ada kewenangan yang dimiliki atau yang melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan system seperti lembaga atau asosiasi, terlepas dari mana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses demokratisasi.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai kehendak yang di inginkan otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian,

---

<sup>9</sup> AG Subarsono, Analisis kebijakan Publik, Yogyakarta: 2012, hal 6

dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.<sup>10</sup>

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan.<sup>11</sup> Menurut Thomas R Dye dalam Dunn (2000:10) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/public policy, pelaku kebijakan/policy stakeholders, dan lingkungan kebijakan/policy environment

Masalah kebijakan (policy problem) adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.<sup>12</sup>

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3). Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok

---

<sup>10</sup> Faried Ali dan Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hal 8

<sup>11</sup> Ag, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : 2012, hal 14

<sup>12</sup> Dunn, William hal :107 .Pengantar Analisis Kebijakan , yogyakarta



ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **2.3. model atau proses implementasi kebijakan**

Pendekatan Merille S. Grindle dikenal dengan implementasion as A political and administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

- Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok
- Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.<sup>13</sup>

Van meter dan van Horn menawarkan suatu model dasar , model yang ditawarkan mempunyai enam variable yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance).<sup>14</sup>

Model ini seperti yang diungkapkan oleh van Meter dan van Horn , tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variable-variabel bebas dan variable terkait mengenai kepentingan-kepentingan , tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variable-variabel bebas. lebih lanjut , mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam baga tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empiric. selain itu, indikatot-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat dikumpulkan. dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan van Meter , kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variable bebas dan variable terikat dalam suatu cara semena-mena.

---

<sup>13</sup> Merille s, grindle

<sup>14</sup> Winarno, Budi. hal :158 , kebijakan public , yogyakarta

Menurut van Meter dan van Horn , identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis kebijakan. indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif .

Empat factor tambahan lain yang tercakup dalam proses implementasi kebijakan seperti dikemukakan oleh van Meter dan van Horn adalah komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana, lingkungan ekonomi , social dan politik yang memengaruhi yurisdiksi atau organisasi implementasi dan kecenderungan ( disposition ) para pelaksana (implementors).<sup>15</sup>

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>15</sup> Winarno, Budi .hal :161, kebijakan publik. yogyakarta

kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran – ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksanaan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dan dasar tujuan-tujuan itu.

Menurut van Meter dan van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.<sup>16</sup>

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

---

<sup>16</sup> Winarno, Budi. hal:162, kebijakan publik, Yogyakarta

Menurut Edwards factor-faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi, empat factor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membatu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini.

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten , tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi itupun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

#### **2.4. Faktor pendukung implementasi kebijakan**

Menurut George Edward, factor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu ;*pertama*, faktor komunikasi. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan ( *clarity* ).Faktor penyampaian informasi dan transmisi seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor lain yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk

pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor berikutnya yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas.

*Kedua*, faktor sumber daya. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. *Ketiga*, disposisi atau kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

*Keempat*, struktur birokrasi. Faktor birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

## 2.5. Faktor penghambat implementasi kebijakan

Menurut Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Isi kebijakan. *Pertama*, implementasi kebijakan karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasi dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi. Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlihat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
3. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi. Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

## **2.6. Tahap-tahap kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita didalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan public adalah sebagai berikut :



### **a. Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan public. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan



agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan .implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang .implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor , organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran(output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses , atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan.implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran , atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa di ukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang public, dan keputusan yudisial.

Van meter dan van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (

atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>17</sup>

b. Evaluasi kebijakan

James Anderson membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga tipe. masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.<sup>18</sup> Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. tipe kedua, evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Suatu evaluasi tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang baik saja. Bisa juga evaluasi dilakukan untuk tujuan-tujuan buruk. evaluasi dengan menggunakan sistematis atau sering juga disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan evaluasi tipe lain.

Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni :

1. mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. analisis terhadap masalah
3. deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

---

<sup>17</sup> Winarno budi, hal : 149 . kebijakan publik. Yogyakarta.

<sup>18</sup> Winarno, Budi, hal: 230. kebijakan publik. Yogyakarta

5. menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.<sup>19</sup>

Evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satu saja dari apa yang bisa dilakukan oleh seseorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Sementara itu, suatu kebijakan mungkin mempunyai konsekuensi yang diinginkan (intended consequences) dan yang tidak diinginkan (unintended consequences) atau malahan kedua-duanya.

Kebijakan mungkin mempunyai dampak keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.

Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi.

Pada dasarnya suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik.

Perubahan kebijakan dan terminasi kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Setelah masalah-masalah

---

<sup>19</sup> Winarno, Budi. hal:234, kebijakan publik. Yogyakarta

kebijakan timbul dan kegagalan-kegagalan program kebijakan diidentifikasi, maka tahap selanjutnya dalam lingkaran kebijakan (policy cycle) adalah perubahan kebijakan atau terminasi suatu kebijakan.

Konsep perubahan kebijakan (policy change) merujuk pada penggantian kebijakan yang sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain. perubahan kebijakan ini meliputi pengambilan kebijakan baru merevisi kebijakan yang sudah ada.

Terdapat beberapa tipe terminasi , mencakup sebagai berikut , pertama , terminasi fungsional. tipe terminasi ini menunjuk kepada suatu wilayah secara keseluruhan (misalnya, pemeliharaan kesehatan). tipe ini mencakup organisasi dan kebijakan, dan ini merupakan fenomena yang sangat jarang. privatisasi pengumpulan sampah merupakan suatu contoh dari tipe terminasi. kedua, terminasi organisasi. Tipe terminasi ini menunjuk pada eliminasi suatu organisasi secara keseluruhan. ketiga, terminasi kebijakan. tipe terminasi ini menunjuk kepada eliminasi suatu kebijakan pada waktu teori yang mendasari atau pendekatan tidak lagi dibutuhkan atau dipercayai benar. keempat, terminasi program. tipe ini menunjuk kepada eliminasi tindakan-tindakan khusus yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

Pada umumnya , terminasi bisa didekati dalam dua cara . pendekatan pertama adalah apa yang disebut terminasi ledakan besar atau the big bang termination. Pendekatan ini biasanya terjadi dengan suatu keputusan otoritatif atau pukulan yang menentukan dalam satu titik waktu

## **2.7. Jenis-Jenis Kebijakan**

Secara traditional, pakar ilmu politik mengkategorikan kebijakan publik ke dalam kategori : (1) kebijakan substantif (misalnya: kebijakan perburuhan, kesejahteraan social, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya); dan (2) kelembagaan (misalnya, kebijakan legislative, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); (3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya, kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru, dan kebijakan masa orde lama). Kategori lain tentang kebijakan dibuat James Anderson (1979:126-132) sebagai berikut :

1. Kebijakan substantif vs kebijakan procedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kebijakan Raskin (Beras untuk orang miskin). Sedangkan, kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Misalnya, kebijakan yang berisi kriteria orang disebut miskin dan bagaimana prosedur untuk memperoleh raskin.
2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Sebagai contoh : kebijakan subsidi BBM dan kebijakan obat generic. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Misalnya, kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB), kebijakan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor. Sedangkan, kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh kebijakan progresif, kebijakan asuransi kesehatan bagi orang miskin.

3. Kebijakan material vs kebijakan simbolis.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Misalnya, kebijakan raskin. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran, misalnya kebijakan libur hari idul fitri dan natal.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*private goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, misalnya kebijakan membangun jalan raya, kebijakan pertahanan dan keamanan. Sedangkan, kebijakan yang berhubungan dengan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas, misalnya pelayanan pos, parkir umum dan perumahan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ag, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hal 19

## **2.8. Kebijakan-kebijakan yang cenderung menghadapi masalah**

Setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. orientasi individu maupun orientasi organisasi akan menjadi salah satu factor pendorong bagi proses-proses penentangan tersebut.

Prospek implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. pelaku dalam implementasi kebijakan meliputi birokrasi, legislative, lembaga-lembaga pengadilan, kelompok-kelompok penekan dan komunitas organisasi.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan diatas meja para pejabat. implementasi kebijakan yang berhasil menjadi factor penting dari seluruh proses kebijakan.

## **2.9. Tinjauan umum tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

### **2.9.1. Pengertian Retribusi**

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapati jasa balik secara langsung yang dapat ditunjukkan. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Marihot P. Siahaan “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.<sup>21</sup>

Pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-jones and White bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi daripada biaya layanan, bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasi saja.

---

<sup>21</sup> Repository.usu.ac.id



Ciri-ciri retribusi daerah :

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan Negara.

**2.9.2. struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :**

- a. Tarif Retribusi sampah biasa adalah sebagai berikut :
  - 1. Rumah tempat tinggal :
    - a. Bangunan Darurat Rp. 1000/bulan
    - b. Bangunan semi permanen Rp.2.500/bulan
    - c. Bangunan permanen Rp. 3.000/bulan
    - d. Bangunan Permanen bertingkat Rp. 3.500/bulan
  - 2. Toko :
    - a. Satu lantai Rp. 20.000/bulan
    - b. Dua (2) lantai atau lebih Rp. 25.000/bulan
  - 3. Rumah Toko (RUKO)
    - a. Dua Lantai Rp. 25.000/bulan
    - b. Tiga lantai keatas Rp.30.000/bulan
  - 4. Hotel / penginapan / wisma / losmen
    - a. Hotel berbintang Rp.30.000/bulan
    - b. Hotel melati / tidak berbintang Rp.20.000/bulan

- c. Penginapan / Wisma Losmen      Rp.10.000/bulan
- 5. Restoran rumah makan, Warung dan café dan sejenisnya
  - a. Restoran / Rumah makan besar   Rp.30.000/bulan
  - b. Restoran / Rumah makan sedang Rp.25.000/bulan
  - c. Restoran / Rumah makan kecil   Rp.20.000/bulan
  - d. Bar dan Diskotik                      Rp.10.000/bulan
  - e. Warung dan Sejenisnya              Rp.5.000/bulan
- 6. Kantor-kantor :
  - a. Kantor Besar                           Rp.40.000/bulan
  - b. Kantor Sedang                         Rp.30.000/bulan
  - c. Kantor Kecil                            Rp.15.000/bulan
- 7. Gudang / ruang penyimpanan barang :
  - a. Besar                                      Rp.30.000/bulan
  - b. Sedang                                    Rp.25.000/bulan
  - c. Kecil                                        Rp.15.000/bulan
- 8. Industri / Perusahaan / Pabrik
  - a. Besar                                      Rp.35.000/bulan
  - b. Sedang                                    Rp.25.000/bulan
  - c. Kecil                                        Rp.15.000/bulan
- 9. Tempat pendidikan / pelatihan :
  - a. TK     Rp.5.000/bulan
  - b. SD     Rp.15.000/bulan
  - c. SLTP                                        Rp.20.000/bulan

d. SLTA/PT	Rp.25.000/bulan
10. Pasar :	
a. Pasar kelas I	Rp.5.000.000/bulan
b. Pasar kelas II	Rp.2.000.000/bulan
c. Pasar kelas III	Rp.750.000/bulan
11. Terminal :	
a. Terminal Tipe A	Rp.2.700.000/bulan
b. Terminal Tipe B	Rp.2.000.000/bulan
c. Terminal Tipe C	Rp.700.000/bulan
12. Salon kecantikan	
a. Besar	Rp.10.000/bulan
b. Kecil	Rp.5.000/bulan
13. Tempat Pangkas Rambut	
a. 1 orang	Rp.5.000/bulan
b. 2 orang	Rp.10.000/bulan
c. 3 orang atau lebih	Rp.15.000/bulan
14. Usaha penjahitan pakaian	
a. 1 orang	Rp.5.000/bulan
b. 2 orang	Rp.10.000/bulan
c. 3 orang	Rp.15.000/bulan
15. Bengkel / revarasi dan pencurian kendaraan	
a. Mobil	Rp.35.000/bulan
b. Motor	Rp.25.000/bulan

c. Sepeda	Rp.5000/bulan
d. Cuci kendaraan	Rp.5.000/bulan
16. Supermarket / swalayan	
a. Besar	Rp.95.000/bulan
b. Sedang	Rp.70.000/bulan
c. Kecil	Rp.50.000/bulan
17. Gedung Pertemuan	Rp.20.000/bulan
18. Gedung Pertunjukkan	Rp.40.000/bulan
19. Gedung Serba guna	Rp.50.000/bulan
20. Gedung Bioskop	Rp.40.000/bulan
21. Pelabuhan	Rp.100.000/bulan
22. Tempat pelelangan Ikan	Rp.100.000/bulan
23. SPBU	Rp.25.000/bulan
24. Sarana / Fasilitas Kesehatan	
a. Rumah Sakit Tipe A	Rp.300.000/bulan
b. Rumah Sakit Tipe B	Rp.250.000/bulan
c. Rumah Sakit Tipe C	Rp.200.000/bulan
d. Rumah Sakit Tipe D	Rp.150.000/bulan
e. Rumah Sakit Khusus	Rp.30.000/bulan
f. Rumah Sakit Bersalin	Rp.30.000/bulan
g. Puskesmas	Rp. 25.000/bulan
h. Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Rp.10.000/bulan
i. Poliklinik/balai pengobatan	Rp.20.000/bulan

j. Tempat Praktek Dokter	Rp.40.000/bulan
k. Apotik	Rp.10.000/bulan
l. Toko obat	Rp.5.000/bulan

25. Sarana olahraga :

a. Stadion	Rp.25.000/bulan
b. Gedung Olahraga (GOR)	Rp.20.000/bulan
c. Kolam Renang	Rp.25.000/bulan

26. Tempat Rekreasi Rp. 50.000/bulan

27. Pedagang kaki lima Rp.200/hari

28. Tempat penjualan kayu (meubel) Rp.25.000/bulan

29. Sampah luar biasa (khusus sifatnya insidentil) :

a. Bongkaran Bangunan	Rp.50.000/1 truk
b. Pangkasan Pohon	Rp.30.000/1 truk

30. Buang sampah langsung ke TPA Rp. 2.500/m

### **2.9.3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

4. Retribusi Pelayanan Pasar.

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8. Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta
9. Retribusi penyediaan / penyedotan kasus
10. Retribusi Pengelolaan Limbah cair
11. Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang
12. Retribusi pelayanan pendidikan
13. Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi

**B. Retribusi Jasa Usaha**

1. Retribusi pemakaian keaayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Pelelangan
3. Retribusi Terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
6. Retribusi Rumah Potong Hewan
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

### C. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

#### **2.9.4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah , retribusi daerah , hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>22</sup>

Widayat (1994:32), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Hukum-hukumindustri.wordpress.com

mengadakan penggalan sumber-sumber obyek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) telah pula menguraikan bahwa :

“ potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah.sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Perusahaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya . didalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya untuk meningkatkan PAD, maka pengelolaan retribusi masih perlu dikaji dan terus ditingkatkan untuk memberikan konstribusi



yang tinggi terhadap peningkatan penerimaan daerah dalam membiayai APBD. Namun peningkatan nominal retribusi tidak semudah yang dibayangkan. Peningkatan jumlah biaya yang ditarik masyarakat harus diawali dengan kebijakan perbaikan system dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini peningkatan biaya retribusi sampah, harus dilakukan setelah perbaikan pelayanan kebersihan dilakukan, sehingga masyarakat tidak berkeberatan membayar sejumlah yang menjadi kewajibannya, selama pemerintah mampu menjamin adanya kebersihan lingkungan pemukiman bagi warga masyarakat.

## **2.10. KERANGKA KONSEPTUAL**

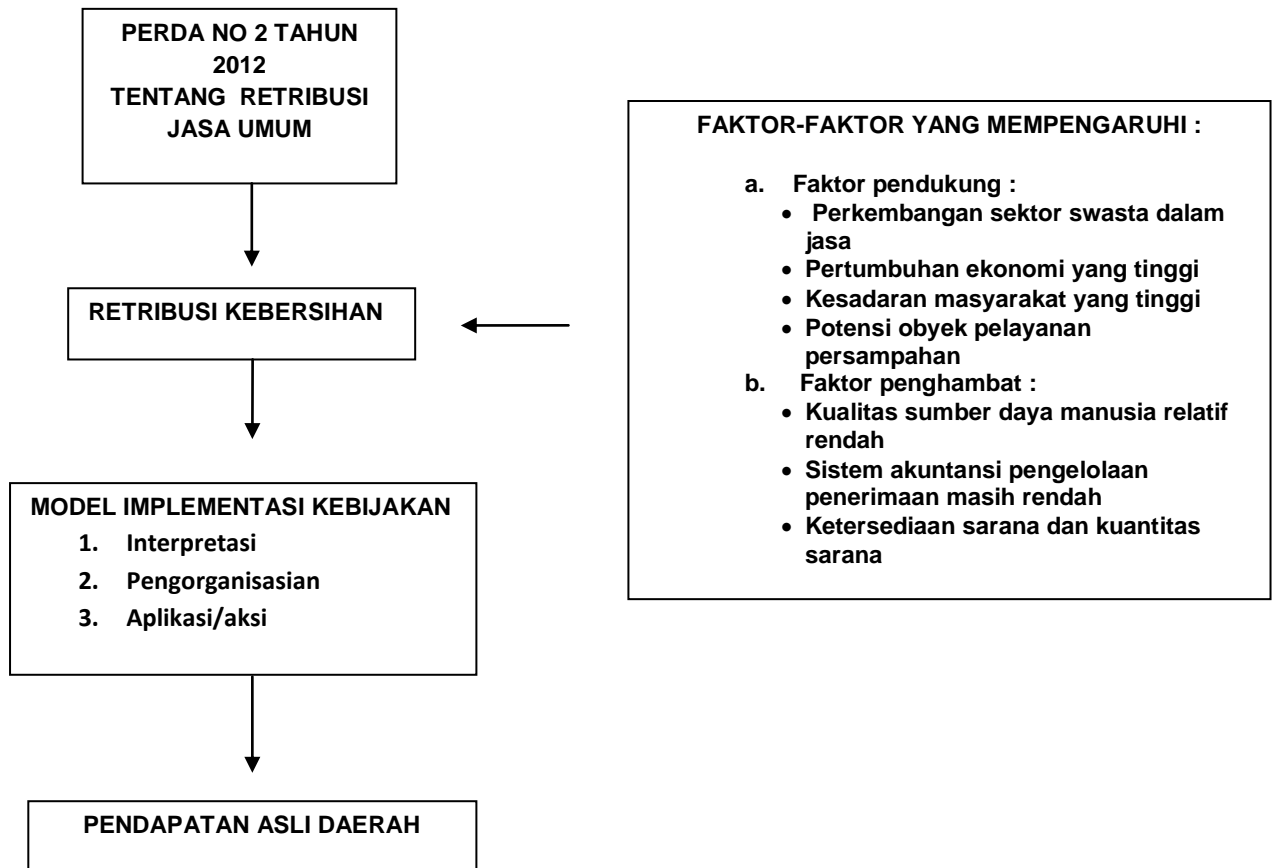
Kebijakan adalah keputusan yang menggariskan kerangka tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kajian retribusi kebersihan oleh pemerintah Kota Palopo adalah telaah terhadap ketentuan yang dibuat, pelaksanaan ketentuan itu serta aspek-aspek yang mendukung dan menghambat pelaksanaan ketentuan Kota Palopo dalam kaitannya dengan retribusi kebersihan.

Tujuan kebijakan menetapkan retribusi kebersihan adalah sebagai upaya untuk menjamin adanya sumber Pendapatan Asli Daerah yang pasti dan terukur dari pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo. Keberhasilan pelaksana kebijakan ini sangat terkait dengan beberapa hal seperti bagaimana cara pelaksanaan kebijakan itu serta sejumlah aspek pendukung maupun penghambat dari implementasi dengan baik

Kebijakan retribusi baik berupa Perda, Perwali, serta konsep Jones yang mengatakan bahwa model implementasi kebijakan meliputi, kegiatan interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.

Untuk mempermudah memahami beberapa hal pokok yang dijadikan landasan berfikir dalam penelitian ini, penulis dapat menyajikan dalam bentuk skema kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut:

**Gambar Kerangka konseptual :**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan di Kota Palopo yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

#### **3.2. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palopo dan lebih fokus kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo.

#### **3.3. Sumber data**

##### **3.3.1 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :
  - Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan

untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi.

Adapun data skunder diperoleh melalui :

- Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
- Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

### **3.3.2. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.

3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **3.4. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo( 2 orang )
- Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan Kota Palopo ( 2 orang )
- Masyarakat Sasaran Retribusi Kebersihan ( 5orang )

### **3.5. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif.

Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan stukepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

### **3.6. DEFINISI OPERASIONAL**

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

- Implementasi kebijakan yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil
- Empat variabel implementasi kebijakan :
  - Komunikasi dan kejelasan informasi
  - Ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu
  - Pelaksanaan program
  - Standar operasi
- Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang diberikan oleh masyarakat untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di hasilkan oleh daerah melalui :
  - Penarikan Retribusi Daerah

- Evaluasi kebijakan merupakan penghasilan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, disini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta atau aksi tetapi berapa nilainya



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Palopo**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian.

Palopo adalah ibukota terakhir Kerajaan Luwu, penafsiran nama Kota tersebut di atas terdapat beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Pada saat tiang penyangga mesjid Djami tua akan didirikan, terdapat lubang untuk memasukkan tiang tersebut yang bahasa daerahnya di Paloppo, dari kata inilah asal kata Kota Palopo.
- b. Secara tradisi masyarakat luwu, apabila ingin membangun suatu bangunan pelaksanaannya dilaksanakan pada sore hari dan disuguhi manisan bernama Palopo semacam beras ketan yang dimasak dan dimakan bersama air gula aren.

- c. Tempat pembangunan mesjid Djami tua terdapat pohon mangga yang besar dan dalam bahasa bugis disebut Paotoppo, dari sinilah asal mula Palopo.
- d. Makam raja-raja Luwu berbentuk piramida yang ditumbuhi pohon Kamoni, oleh penduduk pohon tersebut dinamai pohon Palopo.

Dalam proses perkembangan berikutnya Ibukota Kerajaan Luwu berpindah dari Malangke (Pattimang) oleh Raja Luwu ke-17 yaitu Labasolangi MatinroE Goa anak dari pati Sultan Abdullah Raja Luwu ke-16. Kemudian pembangunan Kota Palopo dilanjutkan oleh putera mahkota yang bernama Sattiaraja, Raja Luwu ke-18. Perpindahan Ibukota didahului oleh pertikaian dalam tubuh kerajaan yakni antara Sultan Abdullah dan Somba Opu yang memperebutkan tahta kerajaan. Sultan Abdullah didukung oleh Makole Baebunta dan Somba Opu didukung oleh Maddika Ponrang yang berkedudukan di Kamanre, sedangkan Maddika Bua adalah wilayah yang netral.

Dengan kondisi demikian masyarakat kerajaan hidup dalam ketidaktentraman akibat diperintah oleh dua orang raja. Atas inisiatif Maddika Bua yang ke-9 yakni Opu Daeng Siba mengundang keduanya untuk melaksanakan pesta makan ikan disebuah muara sungai dikaki Gunung Sampoddo yaitu muara sungai Ratona. Oleh Maddika Bua kedua putra raja tersebut yang bertikai diperintahkan untuk saling menikam, akan tetapi karena malu keduanya hanya saling berpelukan dan menangis, lalu saling mempersilahkan untuk memerintah Kerajaan Luwu.

Sultan Abdullah yang pada akhirnya memerintah Kerajaan Luwu sedangkan Patiaraja berangkat meninggalkan Kerajaan menuju ke kerajaan Gowa yang akhirnya bergelar Somba Opu. Dengan didahului oleh pertikaian tersebut oleh pemangku adat Luwu memilih wilayah netral untuk menempatkan Ibukota Kerajaan Luwu yang pada akhirnya memilih ke Maddikaan Bua yang semula memutuskan wilayah Bastem, akan tetapi karena pertimbangan wilayah tersebut jauh dari pelabuhan maka para pemangku adat memilih wilayah pesisir dalam peradaban kemaddikaan Bua yaitu Kampung To Luwu yang kemudian berubah menjadi Palopo.

#### **4.1.1. Letak dan kondisi geografis**

Posisi astronomis Kota Palopo terletak pada  $2^{\circ}53'15''$ –  $3^{\circ}04'08''$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}03'10''$  –  $120^{\circ}14'34''$  Bujur Timur. Kota Palopo terletak dibagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi geostrategis yang cukup baik. Wilayah Kota Palopo merupakan simpul dari beberapa kegiatan pembangunan ekonomi bagi wilayah *hinterland*-nya. Posisi geostrategis Kota Palopo tersebut memberikan peluang yang cukup besar dalam pengembangan wilayahnya dan membangun sinergitas antar wilayah disekitarnya.

Wilayah Kota Palopo memiliki daerah pesisir di bagian Timur, pegunungan di bagian barat dan dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan. Dengan dimensi wilayah ini, Kota Palopo memiliki 3 (

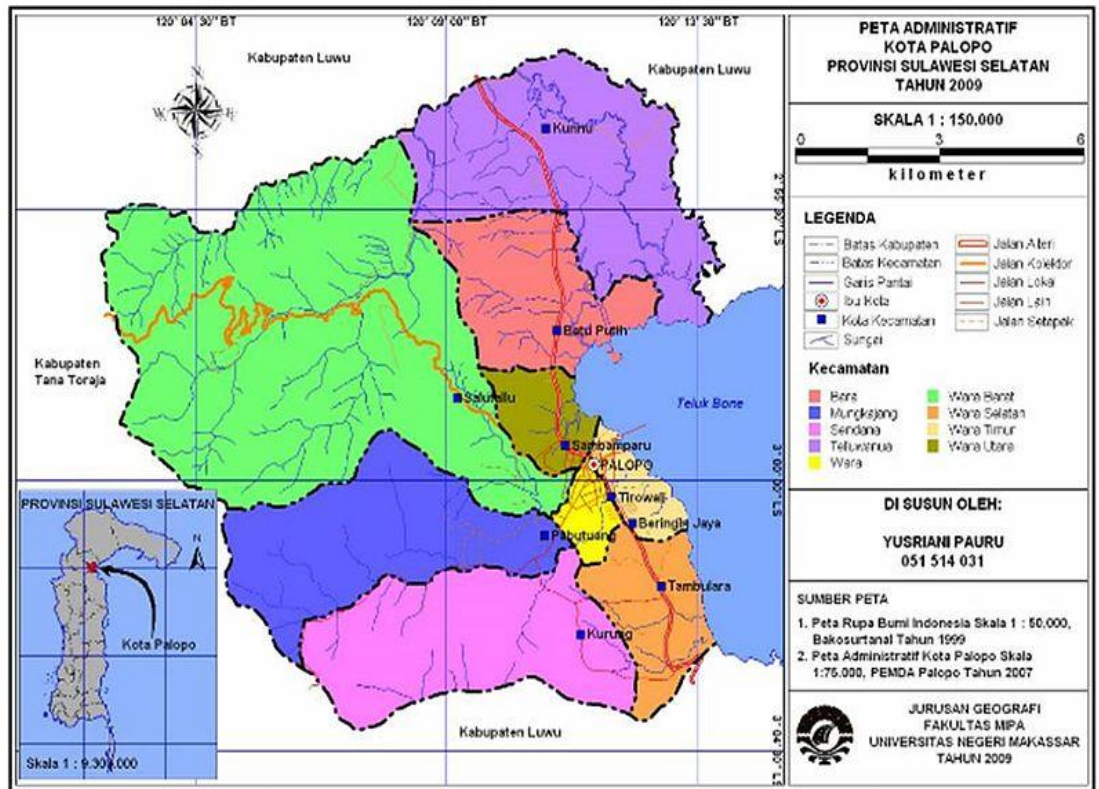
tiga) perspektif pembangunan wilayah yaitu wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah dan wilayah pesisir.

Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Gambar 4.1.  
Peta Wilayah Kota Palopo



Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh Pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan pada tahun 2005. Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Palopo yaitu:

- 1) Kecamatan Wara
- 2) Kecamatan Wara Utara
- 3) Kecamatan Wara Selatan

- 4) Kecamatan Wara Timur
- 5) Wara Barat
- 6) Telluwanua
- 7) Bara
- 8) Mungkajang
- 9) Sendana

**Tabel 4.1.**

**Luas wilayah Kota Palopo Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Wara Selatan	10,66
2	Sendana	37,09
3	Wara	11,49
4	Wara Timur	12,08
5	Mungkajang	53,80
6	Wara Utara	10,58
7	Bara	23,35
8	Telluwanua	34,34
9	Wara Barat	54,13
<b>Kota Palopo</b>		<b>247,52</b>

Sumber : BPS Kota Palopo Tahun 2015

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan keberadaannya diwilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total

luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501-1000 meter di atas permukaan laut, dan selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.

Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah, dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5 derajat sampai dengan 29,7 derajat celcius, dan berkurang 0,6 derajat celcius setiap kenaikan sampai dengan 85% tergantung lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.

Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan (Kawasan Build-up Area) cenderung datar, linier sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi, dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan dan cukup padat adalah di sekitar kawasan pasar (pusat perdagangan dan jasa), sekitar perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, yang merupakan kawasan pemukiman kumuh yang basah dengan kondisi tanah genangan dan pasang surut air laut. Secara garis besar keadaan topografis Kota Palopo ini terdiri dari 3 variasi yaitu daratan rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian Tengah, dan

wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian Barat, Selatan dan sebagian di bagian Utara.

#### **4.1.2. Kependudukan**

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palopo, penduduk Kota Palopo pada akhir 2013 tercatat sebanyak 160.819 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 78.509 jiwa laki-laki dan 82.310 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 95,38 angka ini menunjukkan bahwa bila mana terdapat 100 penduduk perempuan ada 95-96 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk pertahun rata-rata sebesar 2,88 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 650 jiwa per kilometer persegi.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Wara dengan 2.994 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Sendana yaitu 163 per kilometer persegi. Dan rata-rata anggota rumah tangga pada keadaan akhir 2013 tercatat sebesar 5 orang. Jika diamati menurut kelompok umur, terlihat bahwa dari 10.819 jiwa penduduk tercatat sekitar 32,35 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,09 persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 63,56 persen yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) atau dengan kata lain bebantanggungan (Dependency Ratio) Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 51,33 persen



**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Penduduk Kota Palopo**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Wara Selatan	5.073	5.649	10,722
2.	Sendana	3.047	3.010	6.057
3.	Wara	16.518	17.883	34.401
4.	Wara Timur	16.690	17.536	34.226
5.	Mungkajang	3.599	3.758	7.357
6.	Wara Utara	9.935	10.679	20.614
7.	Bara	12.302	12.728	25.030
8.	Telluwanua	6.263	6.086	12.349
9.	Wara Barat	5.082	4.981	10.063
<b>Jumlah</b>		<b>78.509</b>	<b>82.310</b>	<b>160.819</b>

Sumber : BPS Kota Palopo Tahun 2015

Dengan jumlah penduduk yang menembus angka lebih dari seratus enam puluh ribu jiwa, disatu sisi merupakan potensi yang cukup memadai untuk melaksanakan program pembangunan diberbagai aspek kehidupan, akan tetapi disisi lain dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah juga sekaligus merupakan sebuah persoalan dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Misalnya dalam pemberdayaan kaum perempuan.

#### **4.1.3. Kondisi Sosial Budaya**

- **Pendidikan**

Pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 merupakan tugas pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan dan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan dan jabatan yang disandangnya. Artinya semakin baik lapangan pekerjaan dan jabatan yang dimiliki maka tingkat pendapatan yang diperoleh juga semakin baik, dan sebaliknya.

Pendidikan yang lebih baik berpengaruh terhadap peningkatan potensi dasar penduduk dalam menerima perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, berinovasi, dan menyerap teknologi baru untuk mendukung kehidupannya ke arah yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumberdaya manusia secara umum akan semakin tinggi. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun keadaan akhir 2013 sebanyak 61.281 orang, dari jumlah tersebut ada 236 orang diantaranya yang tidak/belum pernah sekolah, 25.126 orang yang

berstatus sekolah dan yang tidak bersekolah lagi tercatat sebanyak 14.381 orang. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebanyak 108.804 orang masih terdapat 11.504 orang yang tidak mempunyai ijazah, 23.532 memiliki ijazah setara SD, 19.836 orang memiliki ijazah setara SLTP, 38.677 orang memiliki ijazah setara SMU, 3.407 memiliki ijazah D1/D2/D3 dan selebihnya yaitu 11.848 orang yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3. Jika dilihat dari kemampuan baca tulis maka sebanyak 105.152 orang dapat membaca dan menulis dan sisanya sebanyak 3.652 tidak dapat membaca dan menulis.

Sesuai dengan visi Kota Palopo, maka Kota Palopo juga memiliki perguruan tinggi, diantaranya untuk jenjang strata satu (S1) adalah Universitas Andi Djemma, Universitas Cokroaminoto, STIEM, STIKES, STAIN, STIPER, dan beberapa akademi (Diploma) antara lain AKPER Kamanre, AKPER Sawerigading, dan beberapa akademi lainnya.

**Tabel 4.3.**  
**Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan**  
**Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Palopo Tahun 2013**

<b>Ijasah</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Seks Rasio</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>Tidak Punya</b>	<b>4.737</b>	<b>6.767</b>	<b>11.504</b>	<b>70,00</b>	<b>10,57</b>
<b>SD/MI</b>	<b>11.539</b>	<b>11.993</b>	<b>23.532</b>	<b>96,21</b>	<b>21,63</b>
<b>SLTP/MTS</b>	<b>9.590</b>	<b>10.246</b>	<b>19.836</b>	<b>93,60</b>	<b>18,23</b>
<b>SMU</b>	<b>15.876</b>	<b>17.487</b>	<b>33.363</b>	<b>90,79</b>	<b>30,66</b>
<b>SMK</b>	<b>3.238</b>	<b>2.076</b>	<b>5.314</b>	<b>155,97</b>	<b>4,89</b>
<b>Diploma I/II</b>	<b>98</b>	<b>303</b>	<b>401</b>	<b>32,34</b>	<b>0,37</b>
<b>Diploma III</b>	<b>989</b>	<b>2.017</b>	<b>3.006</b>	<b>49,03</b>	<b>2,76</b>
<b>Diploma IV/S1/S2/S3</b>	<b>5953</b>	<b>5.895</b>	<b>11.848</b>	<b>100,98</b>	<b>10,89</b>
<b>Jumlah</b>	<b>52.020</b>	<b>56.784</b>	<b>108.804</b>	<b>91,61</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Palopo Tahun 2015

- **Kesehatan**

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dari masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator

dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak langsung. Secara umum kejadian kematian pada manusia berhubungan erat dengan permasalahan kesehatan sebagai akibat dari gangguan penyakit atau akibat dari proses interaksi berbagai faktor yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengakibatkan kematian dalam masyarakat.

Tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Poliklinik dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) tentu sangat menunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Palopo Tahun 2012 sebanyak 2 unit. Tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 495 orang yang bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Namun terjadi penurunan jumlah pengunjung puskesmas yaitu dari 157.432 orang pada tahun 2012 menjadi 141.278 orang pada tahun 2013. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan taraf kesehatan di Palopo.

- **Perekonomian**

Perkembangan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan

apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non residen. Sehingga PDRB bisa digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah/region. Besar kecilnya nilai PDRB suatu wilayah sangat ditentukan oleh aktifitas perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan perbandingan PDRB antar tahun, dapat dilihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Selain itu PDRB juga dapat digunakan untuk melihat struktur perekonomian serta perubahan harga ditingkat produsen (inflasi/deflasi).

Perkembangan perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi tersebut. Untuk itu sebagai usaha meningkatkan laju perputaran roda ekonominya, pemerintah Kota Palopo terus menerus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dengan membuat dan menetapkan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Hingga tahun 2013 perekonomian Kota Palopo menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Hal ini terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar 3,08 triliun rupiah atau naik sebesar 444,10 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2013, nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Palopo juga meningkat hampir 7 kali lipat

dibandingkan keadaan pada tahun 2000. Hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 688,75 persen pada tahun 2013.

Meskipun demikian, kontribusi yang diberikan Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Nilai PDRB Kota Palopo sebesar 3,08 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,71 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi tersebut mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang mencapai 1,70 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output), maka pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeleminasi faktor kenaikan harga. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar.

**Tabel 4.4**

**Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2011-2013**

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan(juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	2.284.801,89	17,36	1.000.569,31	8,16
2012	2.637.545,42	15,44	1.087.419,80	8,68
2013	3.081.642,00	16,84	1.185.210,25	8,99

Sumber : Bappeda Kota Palopo Tahun 2015

Selama periode 2009-2013, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sangat baik. Secara rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,20persen. Rata-rata pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 7,62persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi Kota Palopo selama periode tersebut cenderung lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode 2009-2013, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni mencapai 8,99persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2013 mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya padahal pertumbuhan ekonomi



Provinsi Sulawesi Selatan melambat sebesar 7,65 persen. Kondisi yang sama terjadi juga pada tahun 2011.

#### **4.1.1.6. Visi dan Misi**

##### **4.1.1.6.1. Visi**

Terwujudnya Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agro Industri yang Berwawasan Agama, Budaya, dan Lingkungan yang Terkemuka di Indonesia.

##### **4.1.1.6.2. Misi**

- Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sector.
- Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya sandang dan pangan bagi masyarakat Kota Palopo.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
- Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendorong seara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah tangga, usaha kecil, mikro dan menengah, lembaga keuangan dan jasa, serta

mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

- Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.
- Penataan kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan.
- Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun, guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

#### **4.1.1.7. Profil Pemerintahan Kota Palopo**

Lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi informasi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang mana keterbukaan info sebagai konsekwensi negara demokrasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan menjadikan sarana mengoptimalkan pengawasan publik, dengan demikian peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Undang Undang KIP ini banyak mengatur Keterbukaan Informasi pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan atau

organisasi non pemerintah sebagian seluruh dananya bersumber baik dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri.

Dalam mendukung dan mengimplementasi UU tersebut, Pemerintah Kota Palopo sebagai salah satu Badan Publik telah memberikan Apresiasi untuk menjabarkan serta memfasilitasi Sarana dan prasarana dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai amanat Undang-Undang tersebut yang mempunyai tanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk melaksanakan UU No14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat dapat langsung untuk berpartisipasi terhadap kebijaksanaan, kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Palopo.

Badan Publik dalam hal ini Pemerintah Kota Palopo telah menyediakan Jenis-jenis Informasi Publik yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan Undang Undang yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Informasi yang dikecualikan
5. Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan

Terkait dengan itu Pemerintah Kota Palopo telah membuka website [www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id) dan perangkat sarana prasarana lainnya yang masih dalam pembenahan, tapi dengan langkah seperti ini diharapkan pelayanan yang dapat diberikan lebih maju, transparan, akuntabel dan responsif dalam mewujudkan dan merubah paradigma baru yang mengarah pada Pemerintahan sehingga terwujudnya Good Governance dan Clean Government dalam mendukung tercapainya program pemerintahan dan pembangunan di Kota Palopo yang dapat dirasakan oleh masyarakat kecil untuk menuju sistem pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional.

## **4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo**

### **4.2.1 Sejarah DPPKAD Kota Palopo**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terbentuk melalui PP 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo, dimana Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) digabungkan dengan Sekretariat Daerah Bagian Keuangan sehingga terbentuklah menjadi satu dinas yang dinamakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo .

#### **4.2.2 Tugas Pokok DPPKAD Kota Palopo**

Berdasarkan Peraturan WaliKota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 sebagai unsur pelaksana Daerah pada bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **4.2.3 Fungsi DPPKAD Kota Palopo**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### **4.2.4 Visi DPPKAD Kota Palopo**

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah : *“Mewujudkan terciptanya optomalisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah dalam menunjang pembangunan kota palopo”*

#### **4.2.5 Misi DPPKAD Kota Palopo**

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi, anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

#### **4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPPKAD Kota Palopo:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
  1. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah;
  2. Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
  2. Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
  3. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain.
- e. Bidang Anggaran dan Kas Daerah, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Anggaran;
  2. Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
  3. Seksi Penyusunan APBD.
- f. Bidang Akutansi dan Pelaporan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
1. Seksi Pembukuan dan Akutansi;
  2. Seksi Pelaporan dan Penyajian Informasi Keuangan Daerah;  
dan
  3. Seksi Penyusunan Pertanggung Jawaban.
- g. Bidang Aset membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
1. Seksi Perencanaan dan Pendataan;
  2. Seksi Pengadaan; dan
  3. Seksi Penghapusan
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas**

##### **4.4.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas Pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Kewenangan Desentralisasi di Bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota;

##### **Fungsinya :**

- Perumusan kebijakan teknis sesuai kebijakasanaan yang ditetapkan Walikota;
- Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum lintas SKPD/Instansi/unit kerja di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Perumusan dan Pembinaan Kebijakan Teknis di bidang Pemungutan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



- Penelaah peraturan perundang-undangan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
- Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan UPTD
- Membuat laporan hasil kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- Pendistribusian tugas dan pemeberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya

#### **4.4.2 Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan program kerja dinas, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan Organisasi dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **Fungsinya :**

- Membantu Kepala Dinas dalam Menyelenggarakan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam

organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada di tempat;
- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta kebutuhan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Penelaah Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Penyusunan Program;
- Pelaksanaan Administrasi, Ketatausahaan, Surat menyurat dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- Membuat lapoaran hasil kegiatan Sekretaris serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;

#### **4.4.3 Bidang Pendapatan Asli Daerah**

Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pajak dan retribusi, membimbing, mengendalikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dan mengawasi Seksi Pengelolaan Pajak Daerah, Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

##### **Fungsinya :**

- Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah;
- Melaksanakan Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
- Pemberian saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan Surat-surat Pajak;
- Pelaksanaan Pendataan, Pendaftaran, Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak;

- Membuat Laporan hasil kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya.

#### **4.4.4 Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain – lain**

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain – Lain mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak, Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **Fungsinya :**

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain;
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tingkat Propinsi, Pusat dan yang terkait mengenai Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain;
- Membuat laporan bulanan penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain;
- Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Daftar

Himpunan Pokok Pajak (DHPP) serta Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;

- Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Pelaksanaan verifikasi data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Pelaksanaan pengarsipan di Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain;
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penetapan kebijakan.

#### **4.4.5 Bidang Anggaran dan Kas Daerah**

Bidang Anggaran dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penerimaan Kas Daerah, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Seksi Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Seksi Penyusunan APBD serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Fungsinya :**

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran dan Kas Daerah;
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tingkat Propinsi, Pusat dan yang terkait mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa pemanfaatan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Membuat laporan penerimaan sumber-sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Kas Daerah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Anggaran dan Kas Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan.

**4.4.6 Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembukuan dan Akuntansi, Pelaporan dan Penyajian

Informasi Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggung Jawaban serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Fungsinya :**

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- Melakukan Pembukuan dan Akuntansi, Pelaporan dan Penyajian Informasi Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggung jawaban Penerimaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Membuat laporan penerimaan sumber-sumber Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan.

**4.4.7 Bidang Aset Daerah**

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pendataan, pengadaan dan penghapusan Aset Daerah terhadap Seksi Perencanaan dan Pendataan, Seksi Pengadaan dan

Seksi Penghapusan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Fungsinya :**

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Aset Daerah;
- Perencanaan, Persiapan dan Pengadaan kebutuhan barang inventaris Rumah Tangga Kantor;
- Menyusun administrasi, pengadaan, pendistribusian dan mengusulkan penghapusan barang inventaris Dinas;
- Mengatur pemakaian penggunaan dan pemeliharaan kendaraan Dinas;
- Membuat laporan barang inventaris kantor;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Aset Daerah serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan.

**4.5. Hasil penelitian**

**4.5.1. Potensi dan target penerimaan**

Dalam upaya pemungutan retribusi kebersihan diprogramkandengan peningkatan sistem pelayanan kebersihan, semula



tanggung jawab pemungutan retribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas kebersihan namun dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan besarnya potensi penerimaan retribusi kebersihan adalah sebesar Rp. 246.044.000.,00 dibanding dengan target retribusi tahun 2011 adalah sebesar Rp. 246.044.000,00 dan realisasi retribusi persampahan sebesar Rp. 143.705.500,00 dan selisihnya masih sangat jauh. Hal ini kemungkinan Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum melihat potensi yang ada atau telah melihat akan tetapi sarana dan prasarana Dinas Kebersihan belum mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Akibat lain dari perbedaan sangat besar antara realisasi dengan potensi antara lain :Wajib Retribusi belum bersedia membayar atau tidak membayar karena tidak mendapatkan pelayanan bahkan karena tidak ditagih dan oleh adanya free rider yang menikmati manfaat tanpa menyumbang. Kelompok belum membayar masih bisa diharapkan karena kemungkinan belum ditagih, menunggak atau belum mendapat pelayanan. Harapan tersebut artinya masih dapat diupayakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan ,Keuangan Aset Daerah.

Pengelolaan retribusi kebersihan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengelola retribusi. Ini

diterapkann agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Penataan lingkungan perkotaan dan mengurangi beban social melalui penyerapan tenaga kerja. Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan retribusi kebersihan di Kota Palopo, dapat digambarkan dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 : Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Kota Palopo Tahun anggaran 2011 s/d 2014

No	Tahun anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	2011	246.044.000,00	143.705.500,00	58,41%
2	2012	180.000.000,00	97.875.500,00	54,37%
3	2013	150.000.000,00	61.978.000,00	41,32%
4	2014	139.000.000,00	170.045.000,00	122,33%

Sumber : Dinas PPKAD Kota Palopo Tahun 2015

Dalam hal ini pendapatan asli daerah retribusi kebersihan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terjadi penurunan dan tidak sesuai dengan target yang ada.Hal ini disebabkan karena pada saat itu tidak adanya data real (database) wajib retribusi kepada masyarakat sehingga pendapatan asli daerah retribusi kebersihan pada tahun tersebut tidak terealisasi sesuai dengan target yang ada.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang sangat drastis dimana realiasasi penerimaan retribusi melewati target yang ingin dicapai, hal ini disebabkan karena pada tahun

2014 terjadinya pergantian pemimpin yaitu dimulai dari kepala Dinas hingga Kepala seksi Pendapatan Asli Daerah kota palopo. Setelah pergantian itu, diadakan pendataan ulang wajib retribusi kebersihan kepada masyarakat sehingga realisasi pada tahun berjalan meningkat dari target yang ditetapkan.

Dalam hal ini sasaran pemungutan retribusi di kota palopo hanya 25 kelurahan dari 48 kelurahan di 9 kecamatan yang tersentuh pelayanan pengambilan Sampah rumah tangga di kota palopo. Diantaranya sebagai berikut :

1. Kelurahan lagaligo
2. Kelurahan Tompotikka
3. Kelurahan Dangerakko
4. Kelurahan Pajjalesang
5. Kelurahan Boting
6. Kelurahan Ammasangan
7. Kelurahan Mungkajang
8. Kelurahan Salekkoe
9. Kelurahan Pontap
10. Kelurahan ponjalae
11. Kelurahan salotellue
12. Kelurahan Malatunrung
13. Kelurahan Benteng
14. Kelurahan Surutanga

15. Kelurahan binturu
16. Kelurahan songka
17. Kelurahan takkalala
18. Kelurahan salobulo
19. Kelurahan batu pasih
20. Kelurahan penggoli
21. Kelurahan sabbangparu
22. Kelurahan balandai
23. Kelurahan temmalebba
24. Kelurahan rampoang
25. Kelurahan lebang

Pemungutan retribusi dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima (biasanya dalam bentuk uang). Sedangkan alat yang digunakan dalam pemungutan retribusi kebersihan adalah dengan cara diberikan karcis setiap bulan untuk pada pengguna parsil dan untuk tempat seperti pasar setiap hari bagi penjual. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Palopo Bab V Struktur dan Besarnya tarif retribusi pasal 37 sebagai berikut :

Tarif Retribusi sampah biasa adalah sebagai berikut :

1. Rumah tempat tinggal :
  - b. Bangunan Darurat Rp. 1000/bulan
  - c. Bangunan semi permanen Rp.2.500/bulan

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| d. Bangunan permanen            | Rp. 3.000/bulan |
| e. Bangunan Permanen bertingkat | Rp. 3.500/bulan |
2. Toko :
- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| a. Satu lantai               | Rp. 20.000/bulan |
| b. Dua (2) lantai atau lebih | Rp. 25.000/bulan |
3. Rumah Toko (RUKO)
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a. Dua Lantai         | Rp. 25.000/bulan |
| b. Tiga lantai keatas | Rp.30.000/bulan  |
4. Hotel / penginapan / wisma / losmen
- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| a. Hotel berbintang                | Rp.30.000/bulan |
| b. Hotel melati / tidak berbintang | Rp.20.000/bulan |
| c. Penginapan / Wisma Losmen       | Rp.10.000/bulan |
5. Restoran rumah makan, Warung dan café dan sejenisnya
- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a. Restoran / Rumah makan besar  | Rp.30.000/bulan |
| b. Restoran / Rumah makan sedang | Rp.25.000/bulan |
| c. Restoran / Rumah makan kecil  | Rp.20.000/bulan |
| d. Bar dan Diskotik              | Rp.10.000/bulan |
| e. Warung dan Sejenisnya         | Rp.5.000/bulan  |
6. Kantor-kantor :
- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| a. Kantor Besar  | Rp.40.000/bulan |
| b. Kantor Sedang | Rp.30.000/bulan |
| c. Kantor Kecil  | Rp.15.000/bulan |
7. Gudang / ruang penyimpanan barang :

a. Besar	Rp.30.000/bulan
b. Sedang	Rp.25.000/bulan
c. Kecil	Rp.15.000/bulan
8. Industri / Perusahaan / Pabrik	
a. Besar	Rp.35.000/bulan
b. Sedang	Rp.25.000/bulan
c. Kecil	Rp.15.000/bulan
9. Tempat pendidikan / pelatihan :	
a. TK	Rp.5.000/bulan
b. SD	Rp.15.000/bulan
c. SLTP	Rp.20.000/bulan
d. SLTA/PT	Rp.25.000/bulan
10. Pasar :	
a. Pasar kelas I	Rp.5.000.000/bulan
b. Pasar kelas II	Rp.2.000.000/bulan
c. Pasar kelas III	Rp.750.000/bulan
11. Terminal :	
a. Terminal Tipe A	Rp.2.700.000/bulan
b. Terminal Tipe B	Rp.2.000.000/bulan
c. Terminal Tipe C	Rp.700.000/bulan
12. Salon kecantikan	
a. Besar	Rp.10.000/bulan
b. Kecil	Rp.5.000/bulan

13. Tempat Pangkas Rambut

- |    |                    |                 |
|----|--------------------|-----------------|
| a. | 1 orang            | Rp.5.000/bulan  |
| b. | 2 orang            | Rp.10.000/bulan |
| c. | 3 orang atau lebih | Rp.15.000/bulan |

14. Usaha penjahitan pakaian

- |    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| a. | 1 orang | Rp.5.000/bulan  |
| b. | 2 orang | Rp.10.000/bulan |
| c. | 3 orang | Rp.15.000/bulan |

15. Bengkel / revarasi dan pencurian kendaraan

- |    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| a. | Mobil          | Rp.35.000/bulan |
| b. | Motor          | Rp.25.000/bulan |
| c. | Sepeda         | Rp.5000/bulan   |
| d. | Cuci kendaraan | Rp.5.000/bulan  |

16. Supermarket / swalayan

- |    |        |                 |
|----|--------|-----------------|
| a. | Besar  | Rp.95.000/bulan |
| b. | Sedang | Rp.70.000/bulan |
| c. | Kecil  | Rp.50.000/bulan |

17. Gedung Pertemuan

Rp.20.000/bulan

18. Gedung Pertunjukkan

Rp.40.000/bulan

19. Gedung Serba guna

Rp.50.000/bulan

20. Gedung Bioskop

Rp.40.000/bulan

21. Pelabuhan

Rp.100.000/bulan

22. Tempat pelelangan Ikan

Rp.100.000/bulan

23. SPBU	Rp.25.000/bulan
24. Sarana / Fasilitas Kesehatan	
a. Rumah Sakit Tipe A	Rp.300.000/bulan
b. Rumah Sakit Tipe B	Rp.250.000/bulan
c. Rumah Sakit Tipe C	Rp.200.000/bulan
d. Rumah Sakit Tipe D	Rp.150.000/bulan
e. Rumah Sakit Khusus	Rp.30.000/bulan
f. Rumah Sakit Bersalin	Rp.30.000/bulan
g. Puskesmas	Rp. 25.000/bulan
h. Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Rp.10.000/bulan
i. Poliklinik/balai pengobatan	Rp.20.000/bulan
j. Tempat Praktek Dokter	Rp.40.000/bulan
k. Apotik	Rp.10.000/bulan
l. Toko obat	Rp.5.000/bulan
25. Sarana olahraga :	
a. Stadion	Rp.25.000/bulan
b. Gedung Olahraga (GOR)	Rp.20.000/bulan
c. Kolam Renang	Rp.25.000/bulan
26. Tempat Rekreasi	Rp. 50.000/bulan
27. Pedagang kaki lima	Rp.200/hari
28. Tempat penjualan kayu (meubel)	Rp.25.000/bulan
29. Sampah luar biasa (khusus sifaynya insidentil) :	



- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| a. Bongakaran Bangunan           | Rp.50.000/1 truk |
| b. Pangkasan Pohon               | Rp.30.000/1 truk |
| 30. Buang sampah langsung ke TPA | Rp. 2.500/m      |

#### **4.5.2. Sistem Penarikan**

Mekanisme pemungutan retribusi kebersihan berpedoman kepada mekanisme Retribusi Daerah dengan jalur-jalur sebagai berikut :

1. Jalur SKRD (Surat KetetapanRetribusi Daerah) dan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) pembayaran retribusi :
  - a. SKRD dan SSRD disiapkan oleh Pemerintah Daerah
  - b. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah mendistribusikan ke petuga-petugas pemungut
  - c. Petugas pemungut dari Dinas/Instansi yang bersangkutan melayani dan melaksanakan pemungutan dengan menyerahkan karcis atau SKRD dan SSRD dimaksud kepada Wajib Retribusi.
2. Jalur pembayaran dan penyetoran ke kas Daerah Petugas pemungut menerima pembayaran atas pungutan Retribusi Daerah Petugas pemungut harus menyetor tiap hari seluruh penerimaan atas pembayaran Retribusi Daerah kepada bendahara atau pembantu penerima. Bendahara pembantu penerima Dinas/Instansi setelah menerima penyetoran dari penghasil Retribusi Daerah sesuai waktu yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah selanjutnya menyetorkan hasil penerimaannya ke kas Daerah.

3. Jalur pertanggung jawaban, bendahara pembantu penerima Dinas/Wajib menyampaikan daftar pertanggungjawaban seluruh penerimaan/penyetoran yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada walikota
4. Jalur laporan penerimaan Retribusi Daerah, Dinas/Instansi penghasil Retribusi Daerah wajib melaporkan seluruh hasil penerimaannya kepada Walikota selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dalam hal ini disampaikan ke Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dengan tembusan kepada Bapak Walikota sebagai laporan dan hasil pendapatan daerah kepada Walikota. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan yang termasuk dalam pengelolaan pemungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### **4.5.3. Perbaikan Pelayanan Kebersihan**

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksan Pemerintah daerah dibidang kebersihan, Dinas Kebersihan Kota Palopo mempunyai tugas “ menyelenggarakan usaha untuk mewujudkan Kota Palopo Mapaccing Toda “ kegiatan

penanggulangan kebersihan wilayah Kota Palopo pada dasarnya dilakukan atas tahap-tahap kegiatan sebagai berikut :

- a. Tahap perwadhahan dan pengumpulan sampah, untuk mencegah sampah berserakan yang akan memberi kesan kotor serta untuk mempermudah proses kegiatan pengumpulan, maka perlu disediakan tempat untuk menyimpan/penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah.
- b. Pengumpulan sampah, kegiatan pengumpulan sampah dimulai dari kegiatan penyapuan sampah di jalan-jalan protokol dan non protokol termasuk pelataran/trotoarnya dan kegiatan-kegiatan pengumpulan sampah langsung dari sumbernya
- c. Tahap pengangkutan sampah, pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dengan dua cara, yaitu pengangkutan sampah secara langsung yaitu pengangkutan sampahh dilayani secara langsung dari sumber nya ke TPA dan pengangkutan sampah secara tidak langsung yaitu pengangkutan sampah yang dilaksanakan dari TPS ke TPA.

#### **4.6. Model Implementasi Kebijakan Retribusi**

##### **4.6.1 Interpretasi kebijakan**

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh para individu, kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas

dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh antara lain, kemampuan para pihak dalam menerjemahkan sisi dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan retribusi juga ditentukan oleh sejauhmana kebijakan retribusi itu dipahami oleh aparat yang melaksanakan kebijakan itu. Termasuk dalam hal ini, adalah kemampuan para aparat dalam merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam rangka mewujudkan kebijakan retribusi.

Karena itu, untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia pelaksana. Biasanya hal ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi dan workshop untuk memastikan bahwa kebijakan itu telah dapat dipahami substansinya sebelum dilaksanakan. Kemampuan memahami atau menerjemahkan kebijakan retribusi di Kota Palopo, berbeda antara pemerintah selaku pelaksana dengan masyarakat selaku objek dan sekaligus sasaran dari kebijakan itu. Di tingkat aparat, belum semua pihak yang terkait mampu memahami kebijakan retribusi. Pada level pelaksana lapangan, tidak memahami seluruh isi kebijakan, yang diketahui adalah hanya besar pungutan, tetapi yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penarikan retribusi itu belum dipahami secara mendalam dapat disimak dari pernyataan informan berikut ini sebagai berikut :

“ kami tahu berapa besarnya pungutan yang harus ditarik dari Wajib Retribusi yang menjadi kewajiban setiap unsur pembayar retribusi, tetapi kami tidak sempat membaca isi pada Perda tentang Retribusi itu ( wawancara dengan petugas pemungut retribusi kebersihan pada Dinas Pendapatan Kota Palopo, maret 2015)

Pernyataan diatas makna bahwa isi kebijakannya saja belum diketahui secara keseluruhan, tidak pernah baca perdanya, memang tidak semuanya harus menguasai substansi kebijakan, tetapi dengan mengetahui isi kebijakannya akan memudahkan dalam melaksanakan serta akan lebih mampu menjelaskan kepada masyarakat luas, jika ada unsur masyarakat yang membayar retribusi kebersihan mempertanyakan eksistensi perda tentang retribusi tersebut, salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan adalah ketidakmampuan aparat pelaksana dalam memahami isi kebijakan itu, hal itu juga menjadi penyebab, mengapa kebijakan retribusi di Kota Palopo belum dapat dilaksanakan secara baik dan memberikan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dan target dari adanya perda itu.

Dalam pemahaman masyarakat , setiap pembayaran retribusi kebersihan adalah terkait dengan adanya pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap lingkungan pemukiman warga. Sementara dari perpetif pelayanan kebersihan, petugas hanya melakukan pembersihan pada tempat-tempat umum seperti pasar, jalan umum protocol dan tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat pembuangan sementara (TPS)

“ kami hanya mau membayar kalau lingkungan kami bersih. Kotoran disekitar pemukiman bersih dari sampah, baru kami bayar, kalo tidak bersih, kenapa harus bayar ? warga masyarakat membayar pelayanan publik atas kebersihan ...( wawancara dengan masyarakat pembayar retribusi kebersihan, di Kota palopo, maret 2015 )

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat atas retribusi kebersihan sudah tepat. Hanya saja belum diimbangi dengan pemahaman aparat pelaksana tentang perlunya memaksimalkan pelayanan kebersihan terhadap masyarakat tentang penciptaan lingkungan bersih di Kota Palopo. Di pihak lain, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui untuk kepentingan apa mereka membayar retribusi kebersihan. Membayar retribusi dianggap sebagai kewajiban semua rakyat, yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Padahal dari perpektif pelayanan publik, pembayaran retribusi selalu terkait dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pihak lain kepada yang membayar retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan itu.

“ kita diwajibkan bayar iuran kebersihan setiap bulan dan itu wajib harus dibayar karena ditetapkan oleh pemerintah kota. (wawancara dengan warga pembayar retribusi kebersihan , maret 2015)

Pernyataan itu mengandung makna bahwa membayar iuran kebersihan merupakan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap penduduk kota palopo. Tidak ada kaitannya dengan pemberian pelayanan publikk.Pemahaman ini masih belum tepat salah satu penyebab dari hal itu adalah kurang sosialisai tentang kebijakan retribusi ini. Kurangnya sosialisasi ini dapat disebabkan oleh antara lain keterbatasan SDM aparat, serta faktor pembatas lain yang

memungkinkan kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan retribusi tidak berjalan atau tidak dilaksanakan secara efektif.

Hal itu sejalan dengan pandangan lineberry dalam muchsin, bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menjabarkan tujuan kebijakan dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedures/SOP*). Serta koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara dinas/badan pelaksana serta pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Satu dari empat elemen yang diungkapkan Lineberry sebagai faktor penentu implementasi kebijakan dalam kaitan dengan pemahaman dan interpretasi atas peraturan itu adalah terkait dengan kemampuan merumuskan dan menetapkan standar operasional dan prosedur (*standard operating prosedures/SOP*). Konsep ini lebih dikenal dengan istilah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. SOP ini adalah merupakan panduan bagi unit organisasi yang ada dalam melakukan kegiatan implementasi kebijakan publik yang sedang dijalankan. Unit-unit organisasi yang ditunjuk, dalam melakukan tugasnya tidak boleh berjalan menyimpang SOP yang ada. Sebab bila unit organisasi itu menjalankan aktivitasnya menyimpang SOP yang ada maka besar kemungkinan tujuan yang ingin dari sebuah produk kebijakan tidak akan tercapai.

Pada sisi lain petugas pemungut retribusi kebersihan di Kota Palopo mengalami beberapa kendala, seperti yang di pada wawancara kami :

“....pada waktu penagihan wajib retribusi ke masyarakat sebagian masyarakat tidak mau membayar karena sampahnya tidak dipungut...( wawancara dengan petugas pemungut retribusi kota palopo, maret 2015)”

Dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan sampah, belum ada standar operasional prosedur sebagai pegangan bagi aparat dalam menjalankan tugas sekaligus menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai pembayar retribusi, dan pemerintah kota selaku pemberi pelayanan kebersihan kota. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan maka perlu adanya perumusan kebijakan mengenai SOP dan disosialisasikan kepada semua elemen yang berkepentingan termasuk masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek kebijakan retribusi kebersihan. Tanpa kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi persampahan atau kebersihan, maka target atau cita-cita dari lahirnya kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai atau dapat direalisasikan secara baik.

#### **4.6.2 Pengorganisasian**

Untuk menjalankan suatu kebijakan, diperlukan pengorganisasian yang mantap dan dengan memperhatikan seluruh dukungan sumber daya termasuk dukungan-dukkungan non materi yang dapat mendukung



atau sekaligus bisa menghambat pelaksanaan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan yang baik, biasanya perlu dilakukan oleh tim atau komite pelaksana yang dipersiapkan secara khusus. Jika hal itu terkait dengan aktifitas secara berkelanjutan maka diperlukan pembentukan tim kerja permanen atau kelembagaan baru untuk dapat menjamin terlaksananya kegiatan terkait dengan kebijakan itu.

Menurut Lineberry, muchsin, untuk mengimplementasikan kebijakan secara baik diperlukan suatu pengorganisasian yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan unit organisasi dan staf pelaksana. Elemen ini adalah bagian yang harus dilakukan paling awal dalam kegiatan implementasi kebijakan publik. Sebab tanpa adanya penentuan yang jelas terlebih dahulu atas unit organisasi pelaksana dari implementasi kebijakan publik ini maka proses implementasi kebijakan publik tidak akan dapat dijalankan. Sebuah produk kebijakan baru dapat diterapkan dengan baik ketika telah ada kepastian akan institusi atau organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Pembentukan organisasi dimaksud tidak berarti harus membuat lembaga baru, tetapi yang dimaksud adalah memberdayakan organisasi yang ada. Untuk dapat memberdayakan organisasi yang ada, selain memerlukan kemampuan dan pemahaman yang mendalam, juga perlu adanya jaringan melalui pembentukan koordinasi pelaksanaan kegiatan secara tepat. Menurut Lineberry, koordinasi mencakup berbagai sumber

dan pengeluaran serta pembagian tugas antar lembaga yang ada. Elemen ini lebih mentitikberatkan pada proses teknis yang akan berlangsung dilapangan selama berjalannya proses implementasi kebijakan publik.

Dalam elemen ini ini dipandang bahwa hal ini yang paling penting dalam implementasi kebijakan publik adalah bagaimana para pelaksana implementasi kebijakan publik itu menerapkan strategi-strategi tertentu dalam melakukan pekerjaannya. Strategi-strategi yang paling pokok adalah bagaimana kemampuan mereka melakukan koordinasi antara mereka, koordinasi internal secara horizontal, koordinasi dengan pihak luar sebagai unsur yang ikut menentukan keberhasilan implelementasi kebijakan. Koordinasi dalam konteks ini juga terkait dengan strategi dalam menentukan peran masing-masing pihak, atau melakukan pembagian tugas antar mereka. Kemampuan ini akan mencerminkan bagaimana kerapihan kerja dan *performance* dari organisasi tersebut dalam menjalankannya.

#### **4.6.3 Pelaksanaan kebijakan**

Aspek terakhir yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah faktor, faktor adalah alokasi sumber daya maupun financial secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Maksudnya adalah dalam elemen ini yang dianggap paling penting dalam proses implementasi kebijakan publik adalah terletak pada bagaimana

sumber-sumber yang ada dapat dialokasikan dan didistribusikan dengan adil. Umumnya yang sering terjadi ialah proses alokasi sumber-sumber itu yang sering tidak adil. Umumnya yang sering terjadi bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat miskin misalnya, yang nantinya sampai ketangan masyarakat tinggal sepuluh atau dua puluh persennya saja dari total dana yang dianggarkan.

Sisanya lebih banyak dikorupsi oleh para *implementing agent*. Untuk itu pada element ini kontrol harus dilaksanakan dengan ketat karena pada fase ini seringkali terjadi pelanggaran terutama yang dilakukan oleh implementing agent dengan korupsi sumber-sumber yang tersedia atas sebuah program pembangunan yang merupakan produk kebijakan publik dari pemerintah. Aspek-aspek yang disebabkan itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, bahwa kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan diadministrasikan ketika dibuat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana, yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari tahap birokrasi yang paling rendah sampai yang tertinggi atau top leader, membangun koordinasi internal maupun koordinasi eksternal.

Dalam pelaksanaan kebijakan, dukungan sumber daya, anggaran dan termasuk SDM sangat menentukan. Tanpa dukungan sumber daya sulit untuk diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan, dukungan pendanaan menunjang

perasional belum maksimal dilakukan. Akibatnya, pelaksanaan pelayanan kebersihan belum berjalan dengan baik. Hal itu dipertegas oleh wawancara dengan kadis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut :

“ kami masih kesulitan untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan kota karena masih terbatasnya anggaran, dan armada angkutan sampah yang ada, untuk memacu kinerja pengelolaan kebersihan, perlu didukung sumber daya yang memadai dan pedistribusiannya dilakukan secara proporsional. (wawancara dengan Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo )

Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan, kejelasan rencana aksi juga menjadi faktor penentu. Karena itu setiap pelaksanaan kebijakan perlu kerangka kerja, tujuan dan target yang jelas sebagai pedoman bagi para pelaksana untuk menyelenggarakan kebijakan dengan baik.

#### **4.7. Aspek Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi**

Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn ditentukan oleh antara lain :

- a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur secara tepat. Jika tidak maka implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan.
- b. Sumber-sumber kebijakan seperti dana atau perangsang (*intensive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi secara efektif.

- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana atau koordinasi baik.
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana, yang memiliki kaitan yang erat dengan struktur birokrasi sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
- e. Kondisi lingkungan kebijakan itu sendiri, baik lingkungan, sosial, politik, budaya dan ekonomi, yang semuanya dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- f. Kecenderungan atau sikap para pelaksana seperti kecenderungan mengutamakan diri sendiri yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan<sup>23</sup>

Hasil observasi, wawancara serta diskusi kelompok terfokus dengan sejumlah informan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan Retribusi Kebersihan di kota palopo sebagai berikut :

#### **a. Faktor komunikasi**

Komunikasi kebijakan diperlukan untuk menjamin sekaligus penjabaran pelaksanaan kebijakan ke dalam praktek sehingga antar aktor

---

<sup>23</sup> Winarno,Budi.hal :110 , kebijakan public , yogyakarta

pelaksana dari level atas sampai para pelaksana dilapangan termasuk anggota masyarakat yang menjadi obyek serta kebijakan dapat memahami substansi kebijakan sehingga akan lebih mudah implementasinya. Adanya komunikasi kebijakan secara efektif diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kebijakan juga menjadi efektif. Karena dengan komunikasi yang baik akan melahirkan pemahaman yang sama antara para perumus kebijakan, pelaksana target kebijakan.

Komunikasi menurut Willard V adalah kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari penerima informasi. Selanjutnya Davis mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain. Dari pemahaman ini komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang.

Implementasi kebijakan retribusi kebersihan ini melibatkan berbagai unsur makro seperti pemerintah, perusahaan dan masyarakat, yang masing-masing didalam terdiri dari berbagai elemen dan sub elemen. Agar adanya sinkronisasi sangat diperlukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Terlebih jika dipahami bahwa bahasa komunikasi(*frame of reference*) antara masing-masing pihak sangat berbeda sekali. Pada hal menurut Willbur Scramm, bahwa komunikasi itu akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok

dengan kerangka acuan (*frame of reference*), yaitu paduan pengalaman dan pengertian (*collection of experince and meanings*) yang pernah diperoleh komunikan.

Pada kegiatan pemungutan retribusi kebersihan di kota palopo dari sisi komunikasi antara petugas dan wajib pungut faktor komunikasi sangat besar pengaruhnya, dimana masyarakat sering tidak menyadari akan pentingnya maksud dan tujuan dari pemungutan retribusi kebersihan tersebut, hasil diskusi dengan beberapa informan dapat menyimpulkan sebagai berikut :

“ kami merasa keberatan membayar retribusi kebersihan sebab kami merasa tidak tersentuh dengan pelayanan kebersihan oleh Dinas Kebersihan. Buktinya dilingkungan kami, kalau bukan warga sendiri yang membersihkan tidak akan bersih. Lalu apa yang harus kita bayar, jika kebersihan lingkungan ditanggung oleh warga sendiri (wawancara denngan masyarakat pembayar retribusi maret 2015) “

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa, jika saja persoalan kebersihan diselesaikan oleh pemerintahh atau pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan kebersihan, maka pada dasarnya warga masyarakat tidak keberatan untuk membayar retribusi, sesuai dengan beban yang diberikan kepada mereka. Pengalaman mereka selama ini bahwa masyarakat sendiri yang mengelolah kebersihan lingkungannya. Padahal menurut aturan Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, kewajiban pemerintah dalam mengelola sampah adalah diutamakan pada lokasi-lokasi aktivitas masyarakat secara umum

seperti pasar, Tempat Pembuangan Sementara, Terminal dan tempat-tempat tertentu lainnya.

Kesalahan pemahaman masyarakat seperti itu antara lain disebabkan oleh karena masih kurangnya penyampaian informasi mengenai isi Perda No 2 tahun 2012 itu kepada seluruh lapisan masyarakat kota palopo. Padahal dengan semakin berkembangnya teknologi dan media komunikasi sarana mengkomunikasikan setiap kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat sudah tidak ada masalah lagi. Kata kuncinya adalah pada kemauan politik para pelaksana dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat apakah sudah dilakukan atau tidak. Dalam kasus implementasi kebijakan Retribusi Kebersihan, pelaksanaan sosialisasinya masih belum dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat belum paham benar tentang esensi dari kebijakan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

#### **b. Sikap dan Disposisi Aparat**

Dinas kebersihan dalam hal ini yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sikap aparatur birokrasi dalam proses pelayanan umum belum maksimal dimana proses pelayanan dikatakan berjalan dengan baik menurut Supranto, J :

“ Apabila penyedia jasa memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan dan mutu disebut proses pelayanan yang ada berjalan



dengan baik jika penyedia jasa memberikan pelayanan yang setara dengan harapan pelanggan, sebaiknya dikatakan jelek jika memperoleh pelayanan yang lebih rendah dari harapan.<sup>24</sup>

Presepsi birokrasi (aparatur) terhadap proses pelayanan kepada masyarakat masih terbatas pada pemahaman yang normatif tentang proses tersebut, yang lebih cenderung menunjukkan pemahaman yang kaku dan berorientasi pada tugas demi pencapaian target. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat dan Sucherlt yang mengemukakan bahwa :

“Pada umumnya organisasi pemerintah sering menghadapi tiga masalah yang meliputi kurang efektif, inefisien dan mutu pelayanan yang kurang budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi ini. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan dilakukan secara rutin, teratur sistematis. Selain itu kekuatan dan kewenangan yang disalurkan melalui peraturan prosedur. Kombinasi budaya berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk suatu sikap pandang yang mengacu pada kegiatan (*activity*) dan pertanggungjawaban (*accountability*). Kelemahan dari dua sikap tersebut adalah aspek hasil dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan porsi yang sesuai “

Berdasarkan pendapat diatas, terungkap bahwa sikap pandang dan praktek manajemen yang kurang mengacu kepada hasil (*result oriented*), serta budaya yang counter productive telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Untuk mengatasi budaya tersebut sikap pandang yang terlalu

---

<sup>24</sup> Prawirosoentono, suyadi.1999.hal :39. Kebijakan kinerja karyawan “ kiat membangun organisasi menjelang perdagangan bebas dunia “yogyakarta

berorientasi pada kegiatan dan pertanggungjawaban perlu dikombinasikan dengan orientasi hasil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses pelayanan selalu dipandang sebagai kegiatan rutin, sebagaimana lembaga-lembaga teknis melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pemahaman seperti ini proses pelayanan selalu diartikan sebagai kegiatan yang jika ia mendapat justifikasi dalam kewenangan pemerintah. Pemahaman seperti ini sangat kuat terlihat dalam pengamatan dan wawancara penulis pada Dinas kebersihan pemberi pelayanan pengelolaan kebersihan dan SKPD terkait dan Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab atas pemungutan Retribusi kebersihan.

Pemerintah Kota hanya berorientasi pada peningkatan target penerimaan nominal sekitar retribusi kebersihan tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya perbaikan pelayanan kebersihan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat. Hal seperti ini mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan retribusi, sebab masyarakat hanya mau membayar retribusi kebersihan kepada pemungut jikalau pelayanan yang diberikan juga baik, apalagi jika pelaksanaan pungutan itu tidak bersifat memaksa, dalam arti tidak diikuti dengan pemberian sanksi jika warga yang bersangkutan melalaikan kewajibannya.

Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan dilakukan secara rutin, tertur sistematis. Selain itu kekuatan dan kewenangan yang disalurkan melalui peraturan dan prosedur. Kombinasi budaya berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk suatu sikap pandang yang mengacu kegiatan dan pertanggung jawaban. Kelemahan dari kedua sikap tersebut adalah aspek hasil dan aspek mutu pelayanan kurang mendapatkan porsi yang sesuai. Kasus yang serupa juga ditemukan dalam penyelenggaraan kebijakan retribusi kebersihan di kota palopo. Perhatian pada upaya mengejar target realisasi penerimaan dari retribusi tanpa disertai dengan upaya perbaikan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kebersihan menjadikan masyarakat apatis dalam membayar pajak. Pendekatan target seperti itu bukan berhasil meraih prestasi yang baik melainkan justru menjadi kontra produktif. Pendekatan target penerimaan retribusi diimbangi dengan upaya melakukan perbaikan mutu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat..

### **c. Dukungan Masyarakat**

Didalam upaya menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah dalam hal ini retribusi kebersihan yang maksud dan tujuannya antara lain adalah untuk membantu pemerintah dalam hal ini pembiayaan operasional/pengelolaan kebersihan yang harus ditangani secara optimal sehingga tidak menimbulkan masalah pada tuntutan

perkembangan kota dan upaya peningkatan pendapatan daerah (PAD) sehingga dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan. Hal terungkap dari wawancara dengan seorang informan sebagai berikut:

“.....Program pemerintah kota dalam menetapkan kebijakan penarikan retribusi kebersihan sangat baik apabila diimbangi dengan sistem operasional pelayanan yang baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan dikemudian hari. Namun dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu diperbaiki terutama mekanisme kerja dan perilaku aparat yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut..... (wawancara dengan masyarakat pembayar retribusi kebersihan, maret 2015)

Pengelolaan kebersihan perlu ditangani secara optimal agar tidak menimbulkan masalah dilingkungan pemukiman dalam wilayah perkotaan. Perkembangan kota menuntut kerja keras semua pihak untuk menangani masalah kebersihan, terutam pemerintah kota, bahwa jika sektor kebersihan diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah maka pelayanan kebersihan harus ditingkatkan sebagi dasar untuk meniingkatkan besaran pungutan meningkatnya jumlah pungutan dan realisasi penerimaan sektor retribusi kebersihan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah (PAD) melalui peningkatan partisipasi dalam membayar retribusi atas pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah kota.

Informan di atas menunjukkan bahwa bagi masyarakat, pungutan retribusi kebersihan bukanlah suatu masalah, asalkan penetapan retribusi itu diikuti dengan pelayanan kebersihan bagi masyarakat kota, seperti peningkatan armada angkutan, penambahan jumlah personil, serta

manajemen pengelolaan sampah yang lebih profesional, disertai kedisiplinan petugas dalam menangani sampah dan kebersihan kota secara konsisten dan berkelanjutan.

Retribusi merupakan aspek pembayaran yang cukup penting karena merupakan sumberdaya yang menggerakkan sistem pengelolaan sampah, maka retribusi hendaknya dipersiapkan dengan cara seksama dan mempunyai landasan yang kuat, agar masyarakat dapat menerima kenyataan bahwa untuk mendapatkan hidup yang sehat dan lingkungan yang bersih dibutuhkan biaya. Apabila masyarakat sudah sadar akan kewajibannya maka diharapkan adanya peningkatan penerimaan bagi keuangan daerah Kota Palopo. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan membayar retribusi kebersihan merupakan salah satu komponen pokok dalam rangka berhasil ataupun gagalnya suatu kebijakan.

#### **4.8. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Peta permasalahan implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Palopo terungkap dalam diskusi kelompok terfokus yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan kekuatan, peluang dan ancaman yang terkait dengan implementasi kebijakan retribusi kebersihan dari hasil diskusi kelompok terfokus itu tergambar faktor pendukung (kekuatan dan peluang) dan faktor penghambat (kelemahan dan ancaman) dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Palopo, sebagai berikut :

#### **a. Pendukung implementasi kebijakan**

Beberapa faktor yang mendukung, sekaligus sebagai kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan adalah sebagai berikut:

*Pertama, political will* yang tinggi. Kemampuan politik dalam bentuk komitmen pimpinan daerah mengenai pengelolaan persampahan (*political will*) menjadi kata kunci utama untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan. Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan seperti membangun sistem pelayanan kebersihan yang berkualitas maupun upaya meningkatkan penerimaan dari retribusi kebersihan, diperlukan ketegasan dari komitmen pimpinan dalam melaksanakannya secara konsisten dan berkesinambungan. Tanpa ketegasan, komitmen dan kesungguhan pimpinan lokal khususnya SKPD terkait, serta pemegang hak eksekusi terhadap anggaran seperti legislatif lokal sangat berpengaruh. Dukungan para anggota legislatif sangat menentukan. Hal itu terkait dengan disposisi aparat dalam memahami arti penting dari kebijakan itu sendiri. Pemerintah Kota Palopo memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kebijakan ini dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan banyak kekurangan.

*Kedua, kewenangan* dalam pemilihan dan perumusan kebijakan pengelolaan persampahan. Adanya kewenangan yang otonom sesuai dengan amanata otonomi daerah menjadi sebuah kekuatan yang dapat

mendorong pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan. Kesenangan yang luas ditingkat lokal, baik oleh institusi politik dalam perumusan kebijakn, maupun selaku eksekutif, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah khususnya SKPD terkait untuk mencari dan merumuskan sistem, operasional dan proses pengelolaan kebersihan secara kreatif untuk menangani masah kebersihan untuk mengatasi masalah masyarakat dan memenuhi target penerimaan dari sektor retribusi sesuai dengan target pemerintah Kota Palopo.

*Ketiga*, faktor dukungan sumber daya. Para pelaksana pemerintahan, memiliki kesempatan luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa peningkatan sumber daya financial, SDM maupun tambahan jumlah peralatan adalah sesuatu yang urgen. Pimpinan SKPD memiliki peluang yang tinggi untuk mampu meyakinkan pimpinan daerah tentang urgensi pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Palopo. Adanya kewenangan dalam mengelola anggaran dan program menjadi kekuatan bagi terlaksanakannya kebijakan retribusi dengan baik. Hal itu terungkap dari wawancara dengan seorang informan sebagai berikut :

“... kami hanya memberikan fasilitas pelayanan sampah seperti motor, mobil sampah dan bak sampah di setiap rt/rw dan menyediakan anggaran kebersihan untuk petugas kebersihan....(wawancara dengan kepala bidang retribusi, maret 2015 )”

Sumber daya manusia yang banyak, menjadi modal utama untuk mendorong terwujudnya pelayanan kebersihan secara maksimal sekaligus sebagai kekuatan dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan serta mengelola pungutan retribusi dari sektor kebersihan secara berkelanjutan.

*Keempat*, kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini sudah mulai tumbuh. Masyarakat sudah sadar membayar iuran kebersihan selain itu, faktor dukungan teknologi informasi juga dapat memudahkan para pelaksana melakukan sosialisasi kebijakan kepada semua elemen masyarakat agar isi kebijakan lebih mudah dipahami.

Beberapa faktor yang mendukung sekaligus sebagai peluang dari pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi kebersihan diantaranya :

1. Perkembangan sektor swasta dalam jasa pelayanan persampahan. Berkembangnya sektor swasta menjadi peluang pengembangan kebijakan ini, sebab semakin banyak usaha swasta semakin besar potensi pembayar retribusi, yang berarti peluang untuk mendapatkan penerimaan sektor retribusi juga semakin bertambah.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi masyarakat adalah peluang besar bagi pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi, sebab dengan peningkatan pendapatan perkapita menjadikan masyarakat tidak terbebani lagi



dengan pungutan retribusi termasuk retribusi sampah. Bagi masyarakat yang sudah memiliki pendapatan yang tinggi, pungutan retribusi akan dinilai ringan sebab jumlah nominalnya tidak seberapa dibandingkan dengan pendapatannya yang relatif semakin tinggi dan membaik.

3. Kesadaran masyarakat tinggi. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk membayar retribusi merupakan sebuah peluang, karena masyarakatlah yang menjadi pembayar retribusi baik masyarakat kalangan usahawan, maupun masyarakat biasa atau para pengusaha. Adanya kesadaran membayar retribusi yang tinggi perlu dipelihara, dan diimbangi dengan pemberian pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan yang lebih baik dan semakin berkualitas.
4. Potensi obyek pelayanan persampahan, jumlah penduduk yang semakin bertambah, jumlah perusahaan yang semakin meningkat, jumlah hotel dan restoran yang semakin meningkat semuanya merupakan peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan di kota palopo. Karena selain menambah jumlah pembayar juga akan meningkatkan jumlah nominal pembayaran terutama dari perusahaan hotel dan restoran serta industry yang nilai kewajiban retribusinya lebih besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat pembayar pajak lainnya seperti rumah tangga biasa.

Pengembangan kerjasama dan partisipasi lembaga lain penting sebagai sebuah program bersama dengan masyarakat luas, selaku

memperkuat dukungan publikasi perlunya memaksimalkan pembayaran retribusi kebersihan guna membantu pelaksanaan kebijakan ini. Memberdayakan masyarakat merupakan suatu sinergi yang sangat bermanfaat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi kebersihan dan pengelolaan persampahan. Para pengelola merupakan sumber daya manusia yang perlu diperkuat kualitasnya dan di tingkatkan jumlah disertai dengan menaikkan tunjangan secara memadai, guna menjamin adanya kerja keras dari petugas, dan perlu disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

#### **b. Faktor Penghambat Implementasi**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, selain ditentukan oleh adanya faktor pendukung yang memadai, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat yang harus dan perlu diatasi untuk menjamin terlaksananya kebijakan retribusi secara baik. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi persampahan di kota palopo, sekaligus menjadi kelemahan diantaranya sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia relatif rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sebagai petugas, baik sebagai pemungut retribusi dan terutama sebagai pelaku petugas kebersihan yang mampu memberikan pelayanan kebersihan secara baik dan berkelanjutan.

2. Sistem akuntansi pengelolaan penerimaan masih relatif rendah dan ini perlu pembenahan agar pengelolaan sumber penerimaan retribusi kebersihan di kota palopo dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperoleh hasil yang efektif terutama untuk mencapai target penerimaan sektor retribusi kebersihan secara berkelanjutan.
3. Ketersediaan sarana dan kuantitas sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang. Padahal, ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kebersihan, terutama dalam kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan kebersihan dan penanggulangan sampah. Karena keterbatasan sarana dan prasana ini pula yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan sampah di kota palopo.

Hambatan lain, yang juga sekaligus sebagai ancaman dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, volume sampah –sampah yang terus meningkat, jika tidak dikelola dengan baik dan disertai armada pengangkut sampah yang memadai serta sumber daya manusia yang handal akan berdampak pada pengelolaan kebersihan yang tidak baik. Hal itu akan berdampak pada

menurunnya minat masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan secara keseluruhan.

*Kedua*, meningkatnya tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan kebersihan. Jika tuntutan publik tidak dipenuhi terutama menyangkut perbaikan layanan kebersihan dan pengangkutan sampah, maka akan membuat masyarakat apatis atau tidak mau lagi membayar retribusi kebersihan di kota palopo.

*Ketiga*, masih rendah kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur, terutama para PKL ( pedagang kaki lima ).

*Keempat*, belum efektifnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum mengenai kebersihan.

*Kelima*, sering terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah sehingga warga enggan untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur

Menurut versi aparat kebersihan kota, telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan.

1. Upaya mendorong peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendukung wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan saluran limbah domestik, pengadaan sarana sanitasi limbah cair/padat.

2. Mendorong terciptanya tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.
3. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pemukiman warga dan taman perkotaan.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Edward III bahwa berhasil tidaknya implementasi sebuah kebijakan sangat oleh banyak faktor Edwards III, seperti pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan atas kebijakan yang ada, proses komunikasi kebijakan, yakni sejauhmana komunikasi kebijakan itu dilakukan secara efektif, dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, maupun sumberdaya pendukung seperti sarana, prasarana, teknologi. Selain itu faktor lain yang juga menentukan adalah watak atau sikap aparat dan masyarakat dalam memahami kebijakan dan menjalankan kebijakan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi dan organisasi pendukung serta koordinasi antara lembaga yang berkepentingan dan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan secara baik.

Kondisi pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan yang terjadi di kota palopo, juga relevan dengan pandangan Cheema dan Rondinell, bahwa faktor-faktor yang sering mempengaruhi kebersihan implementasi kebijakan dikelompokkan dalam lima bagian, yakni kondisi lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan dan ini terkait dengan masalah politik budaya masyarakat, hubungan dalam organisasi, kemampuan dalam

pelaksanaan, karakteristik lembaga pelaksana, dan pengaruh pelaksanaan.

Oleh sunggono menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh ada tidaknya dukungan atau partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya kesadaran masyarakat, menjadi kata kunci dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang terkait langsung dengan masyarakat seperti kebijakan kebersihan. Hal itu juga terbukti di kota palopo, bahwa adanya dukungan sebagai masyarakat telah mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dimaksud. Dan adanya penolakan segelintir orang juga telah mempengaruhi kinerja aparat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan di kota palopo.

Pengelolaan retribusi kota palopo dilaksanakan berdasarkan Perda No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada Bab II bagian kedua, Pasal 5 dan Pasal 37 Kota Palopo. Pelaksanaannya melibatkan beberapa SKPD terkait. Pengelolaan retribusi kebersihan di kota palopo secara khusus dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab dari Dinas Kebersihan tetapi dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Palopo.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa :

1. Retribusi kebersihan di Kota Palopo merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Implementasi kebijakan retribusi kebersihan kota palopo didasarkan pada perda No. 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Palopo No. 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kebersihan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. sementara pelayanan kebersihan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan. Implementasi kebijakan ini belum maksimal, proses sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik, penggalan potensi masih kurang dilakukan penepatan target penerimaan dan realisasinya pun masih rendah. Kontribusinya retribusi kebersihan terhadap PAD masih kurang, padahal berdasarkan potensi yang ada, kontribusi kebersihan terhadap PAD masih dapat ditingkatkan. Kualitas pelayanan kebersihan belum memuaskan, masyarakat merasa bahwa apa

yang dibayarkan sesuai kebijakan retribusi kebersihan, belum sesuai dengan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah kota. Proses pengawasan belum maksimal. Pelaksanaan pemungutan oleh petugas belum sesuai benar dengan peraturan yang ditetapkan di antaranya masih ada pemungutan retribusi kebersihan ketentuan yang telah ditetapkan dan peraturan yang ada.

2. Berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Palopo. Faktor pendukung implementasi kebijakan retribusi kebersihan di kota palopo adalah kewenangan dalam pemilihan dan perumusan kebijakan pengelolaan persampahan, faktor dukungan sumber daya. Kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini sudah mulai tumbuh, berkembangnya sektor swasta dalam jasa pelayanan persampahan. Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah kualitas sumber daya manusia relative rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sistem akuntansi pengelolaan penerimaan masih relative rendah. Ketersediaan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas belum memadai, petugas lapangan yang relative masih sangat rendah, volume sampah-sampah yang terus meningkat, tuntutan masyarakat akan perbaikan pelayanan kebersihan, ketersediaan teknologi pengelolaan sampah daur



ulang belum ada. Kendala-kendala lain adalah kesadaran untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur belum maksimal, tingkat pelayanan pengelolaan persampahan belum maksimal, belum efektifnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum kebersihan, terjadinya keterlambatan dalam pengangkutan sampah dan minimnya biaya operasional pemeliharaan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan, maka penulis memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perlu dimaksimalkan terutama proses sosialisasi, penggalan potensi baru, penerapan target penerimaan yang realistis sesuai dengan potensi yang ada, peningkatan kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat, meningkatkan proses pengawasan dan menjalankan kebijakan sesuai aturan, termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan melalui penyuluhan, pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum retribusi kebersihan dan meningkatkan biaya operasional pemeliharaan.
2. Terhadap obyek-obyek retribusi yang ada hendaknya perlu dipelihara dan dijaga serta perlu meningkatkan pencarian obyek-obyek retribusi potensial yang dapat dijadikan Retribusi Daerah yang mendukung peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pendidikan, komitmen dan keuletan menjalankan tugas, perbaikan sistem akuntansi pengelolaan penerimaan retribusi, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, perbaikan upah petugas lapangan dan pembangunan teknologi pengolahan daur ulang sampah. Untuk meningkatkan motivasi petugas mulai dari petugas kebersihan serta pemungut retribusi kebersihan dengan menaikkan gaji/honor mereka secara memadai sesuai keadaan sekarang, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka dapat lebih meningkatkan semangat dan gairah kerja dalam melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali, Faried., dan Andi Syamsu Alam. 2012. ***Studi Kebijakan Pemerintah***.Bandung : PT Refika Aditama

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Ag, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hal 19

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto.Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Keban, Yeremias T.1995. *Indikator Kinerja Pemda, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta : Fisip UGM

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang ; Model-model, perumusan, implementasi dan evaluasi*.Jakarta : Gramedia

Prawirosoentono, suyadi.1999.hal :39. *Kebijakan kinerja karyawan “ kiat membangun organisasi menjelang perdagangan bebas dunia “yogyakarta*

Syafie, Inu Kencana (2013). ***Ilmu Pemerintahan***. Bandung :

Mandar Maju

Satori, Djama'an. (2013). ***Metode Penelitian Kualitatif***,

Jakarta : Alfabeta

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (

CenterOf Academic Publishing Service)

**Website :**

[Id.m.wikipedia.org.pukul.20:50](http://id.m.wikipedia.org.pukul.20:50), 15 januari 2015

[Repository.usu.ac.id](http://Repository.usu.ac.id)

[Hukum-hukumindustri.wordpress.com](http://Hukum-hukumindustri.wordpress.com)

Teori merrille s, grindle

**Perundang – undangan :**

Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang  
Retribusi Jasa Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah